



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili (Kode Pos 92981)

Email : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 40 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
11. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 29);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 372 Tahun 2021 tentang Penetapan Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 373 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Peta Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung; dan
 2. Peta Proses Bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel 0.
 3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.
 4. Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2021

 **KEPALA PELAKSANA,**

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
2. Kepala BAPPELITBANDA Kab. Luwu Timur;
3. Kepala BPKD Kab. Luwu Timur;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2021-2026

PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

Bagan Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	UTAMA	 BPBD 01 Peningkatan ketahanan daerah menghadapi bencana
	PENDUKUNG	 BPBD 02 Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

BPBD 01 Peningkatan ketahanan daerah menghadapi bencana

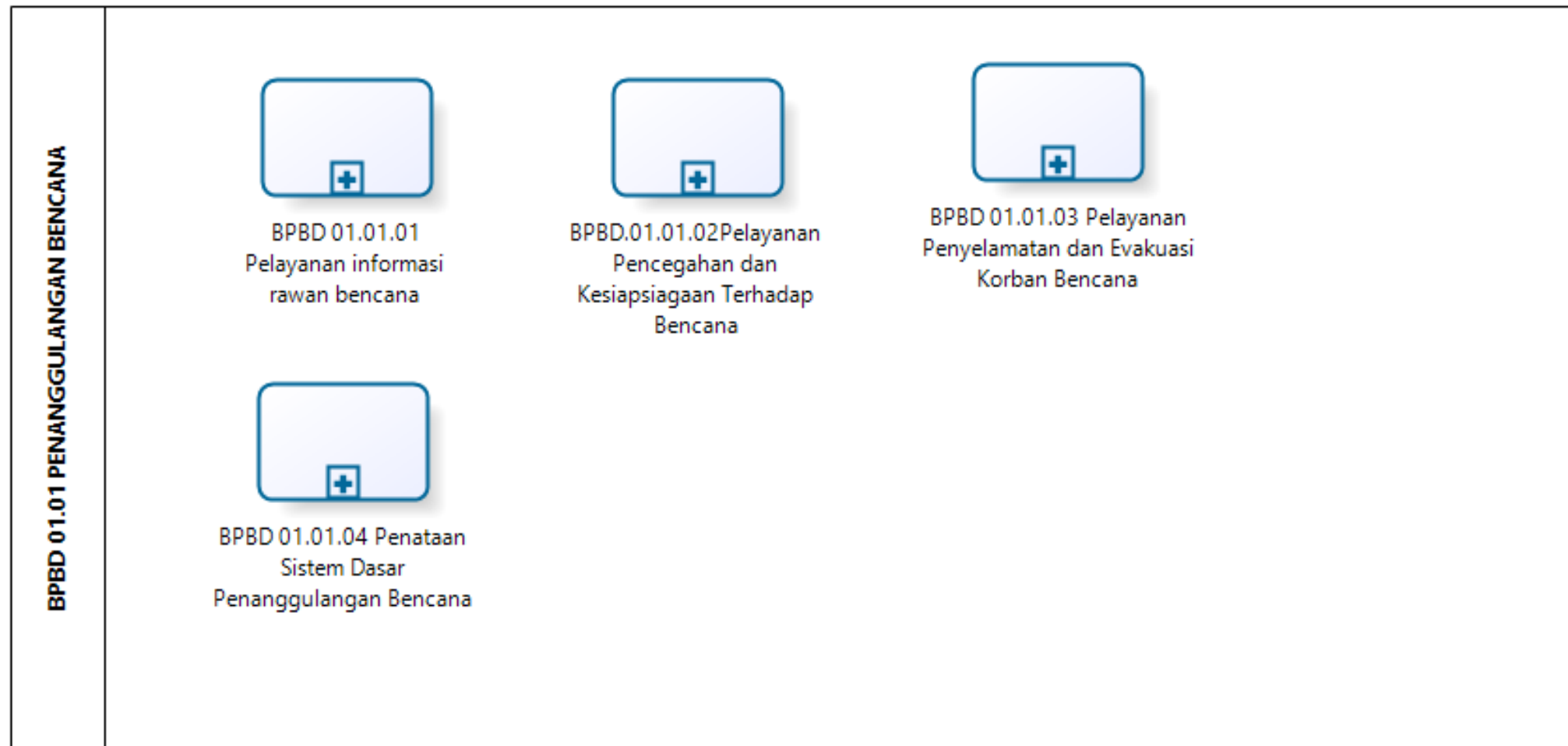


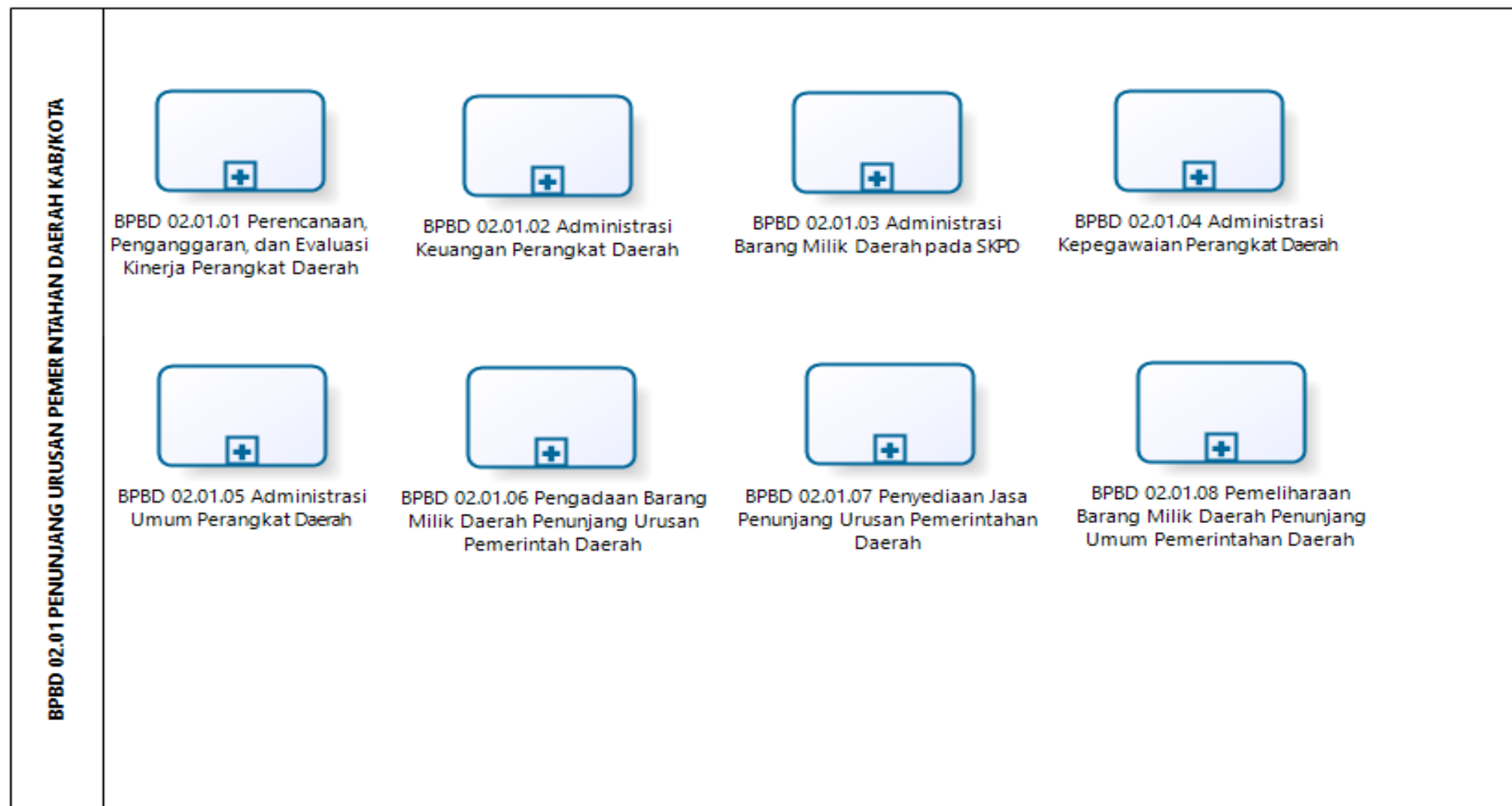
BPBD 01.01
PENANGGULANGAN
BENCANA

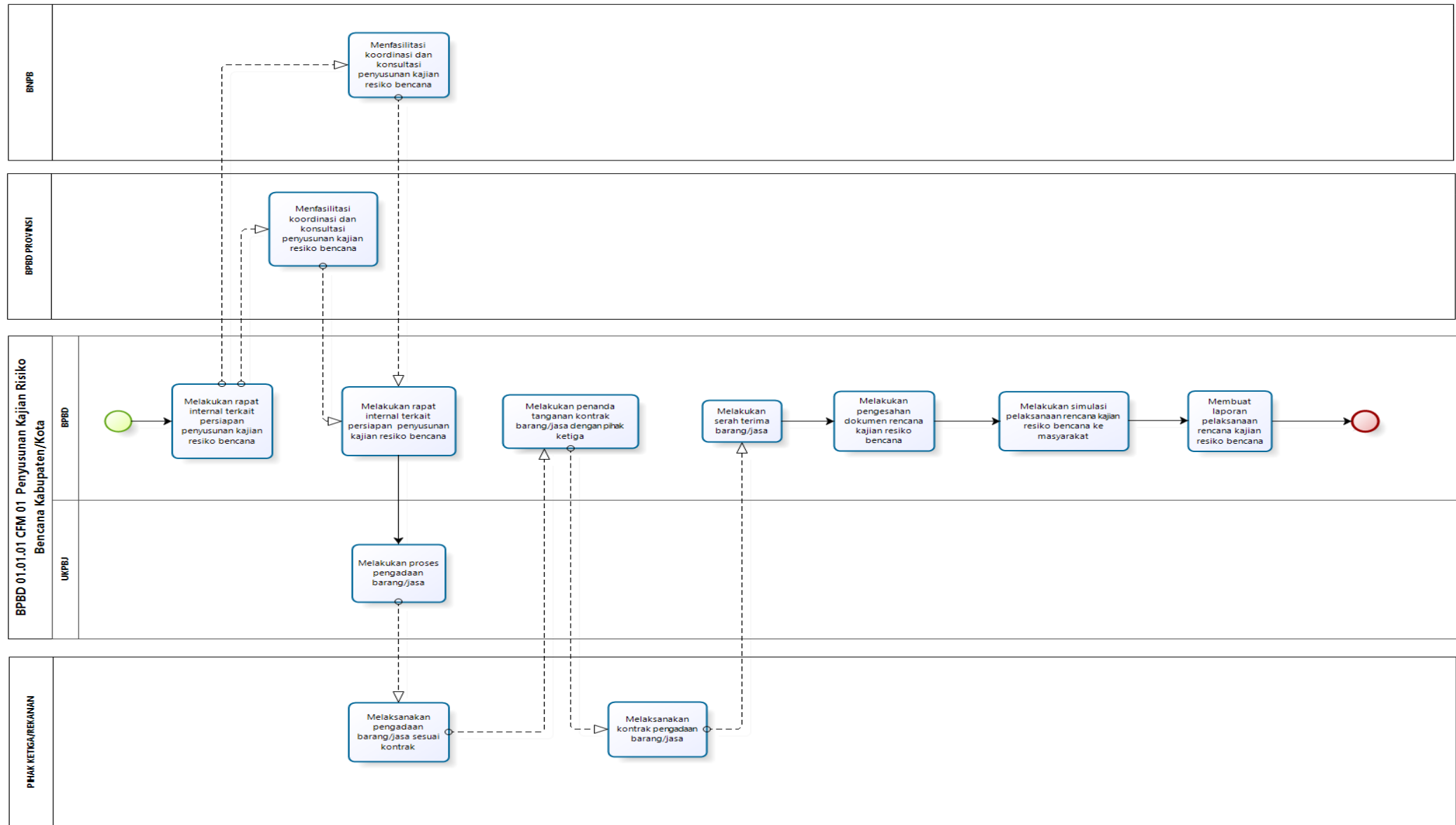
**BPBD 02 Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja
penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

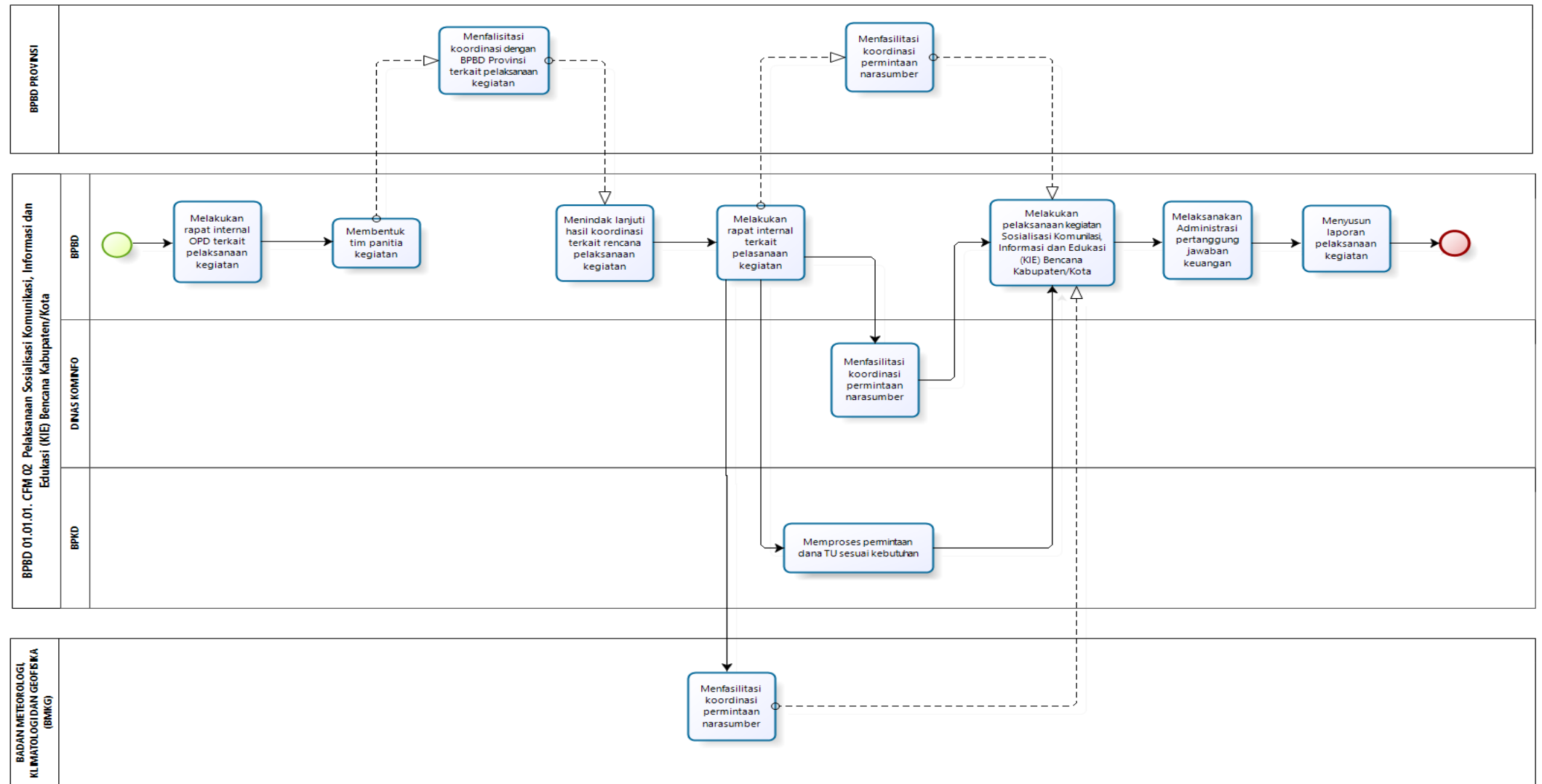


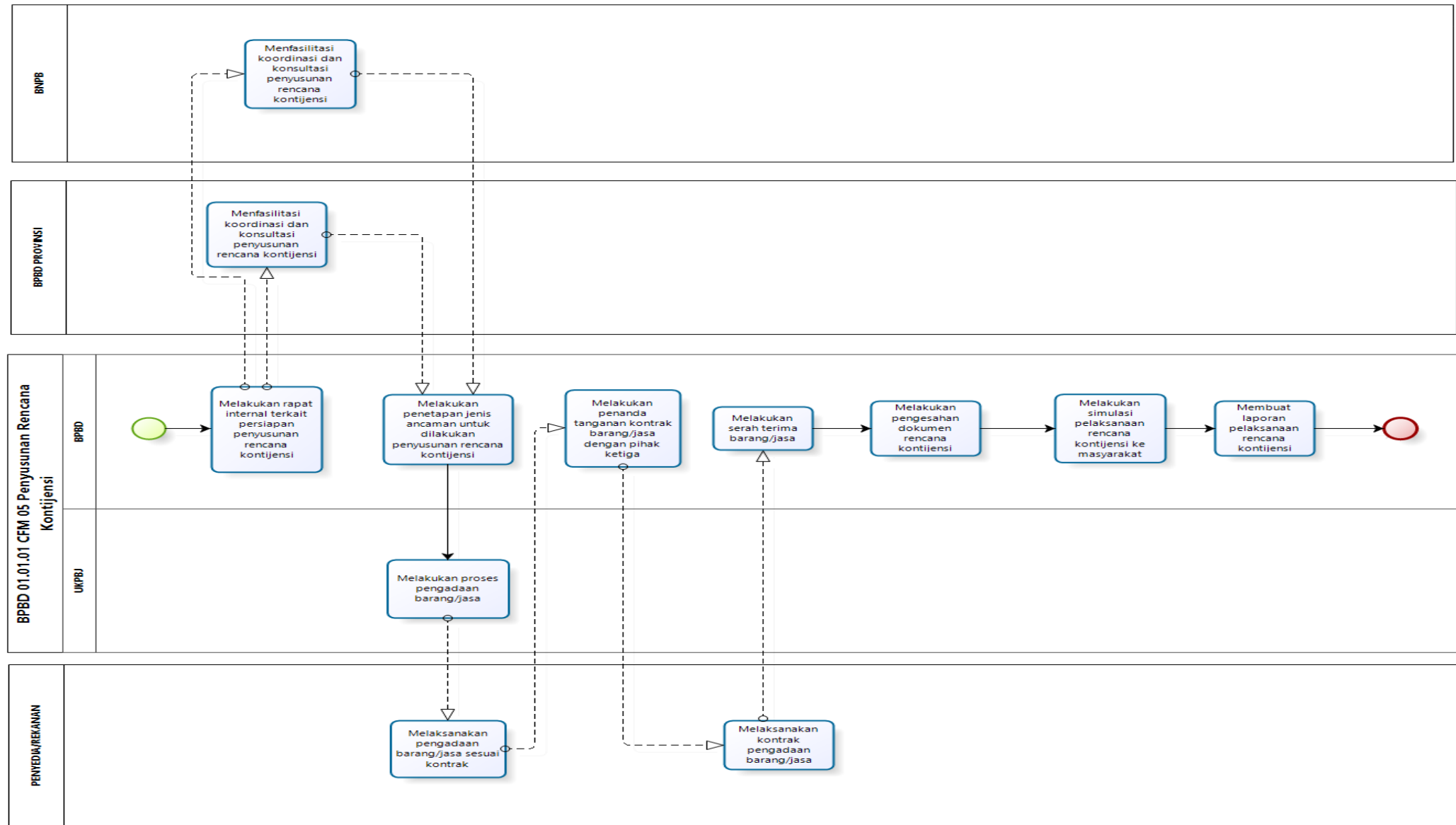
BPBD 02.01
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA

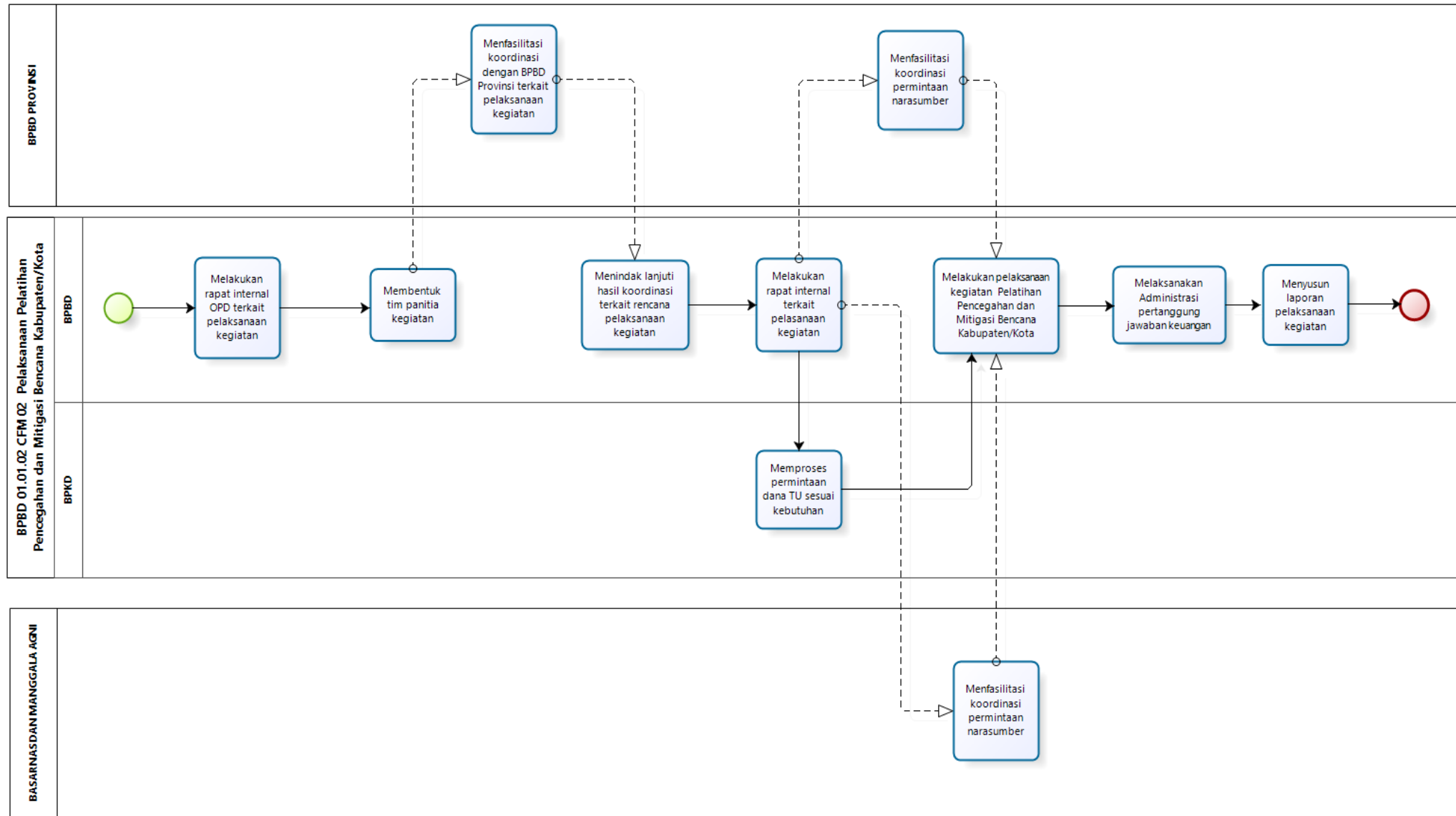


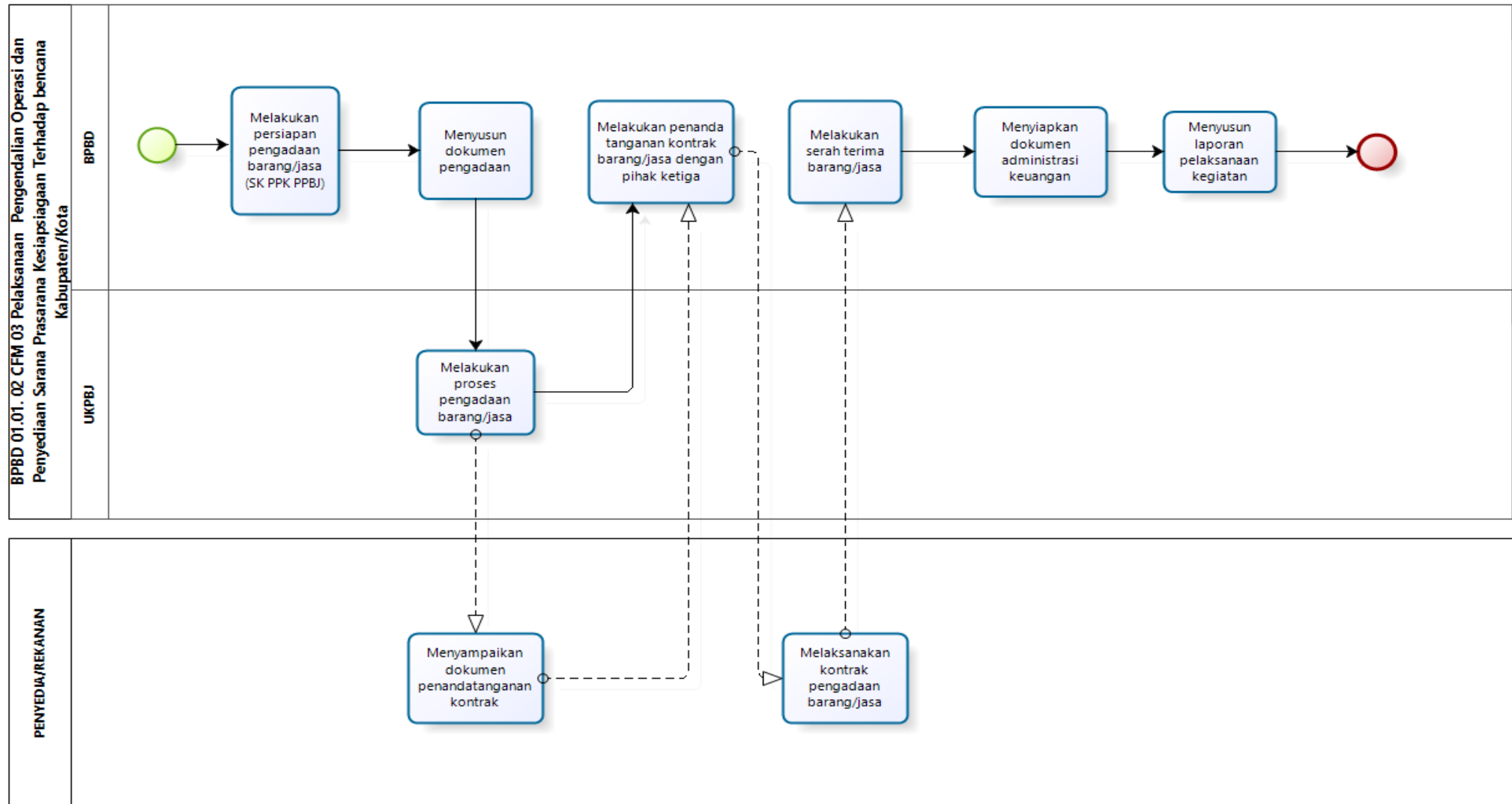


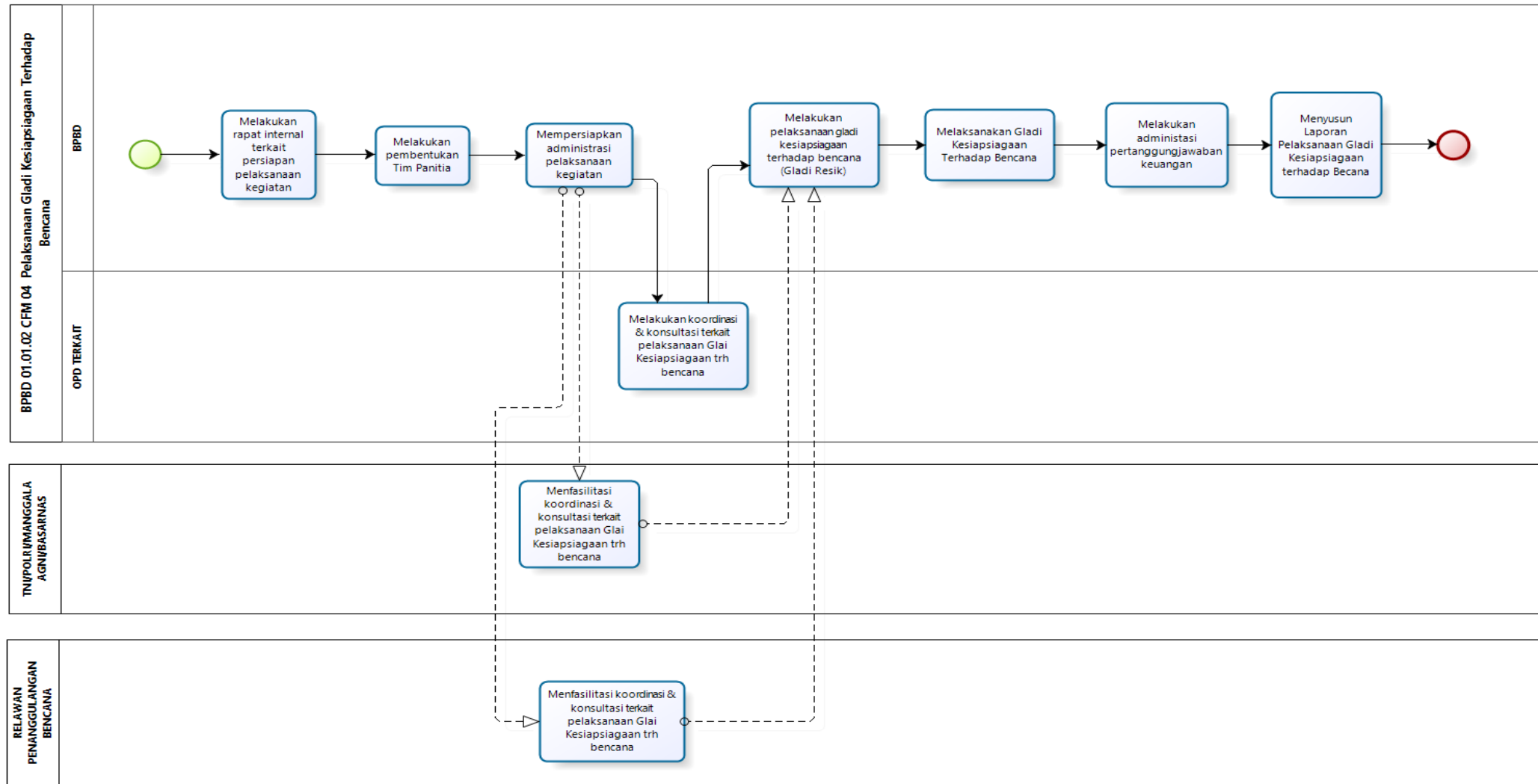


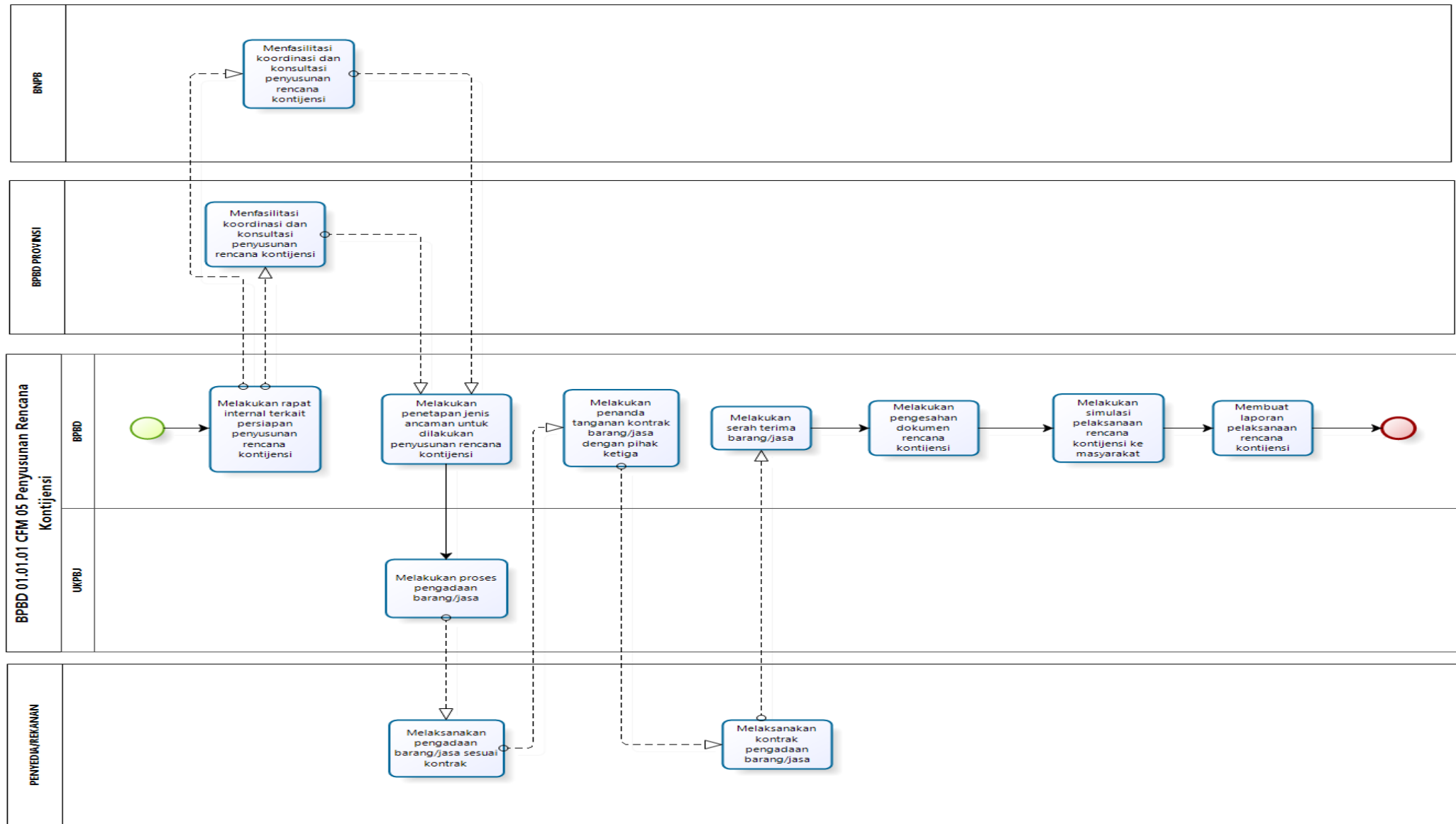


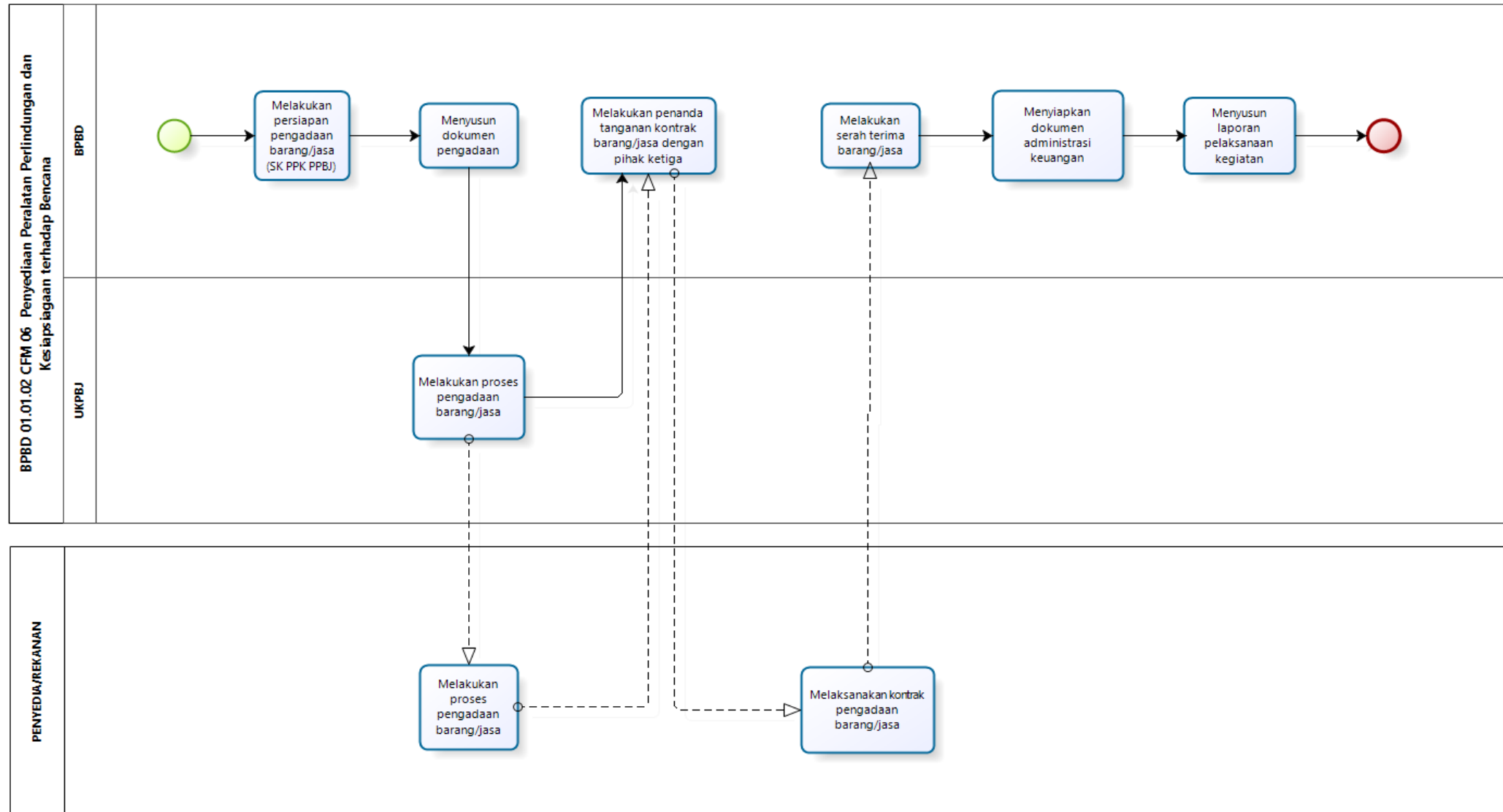


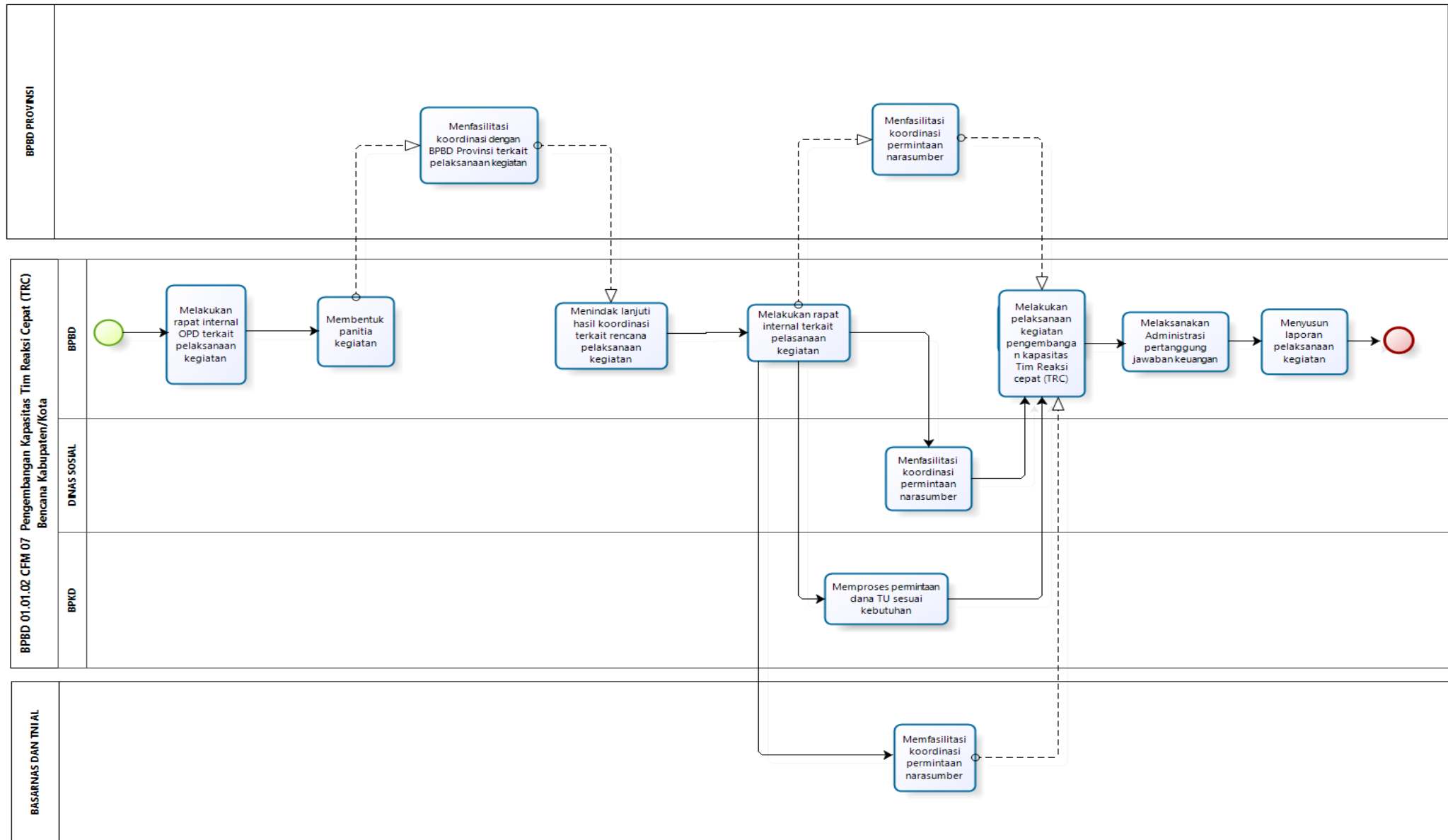


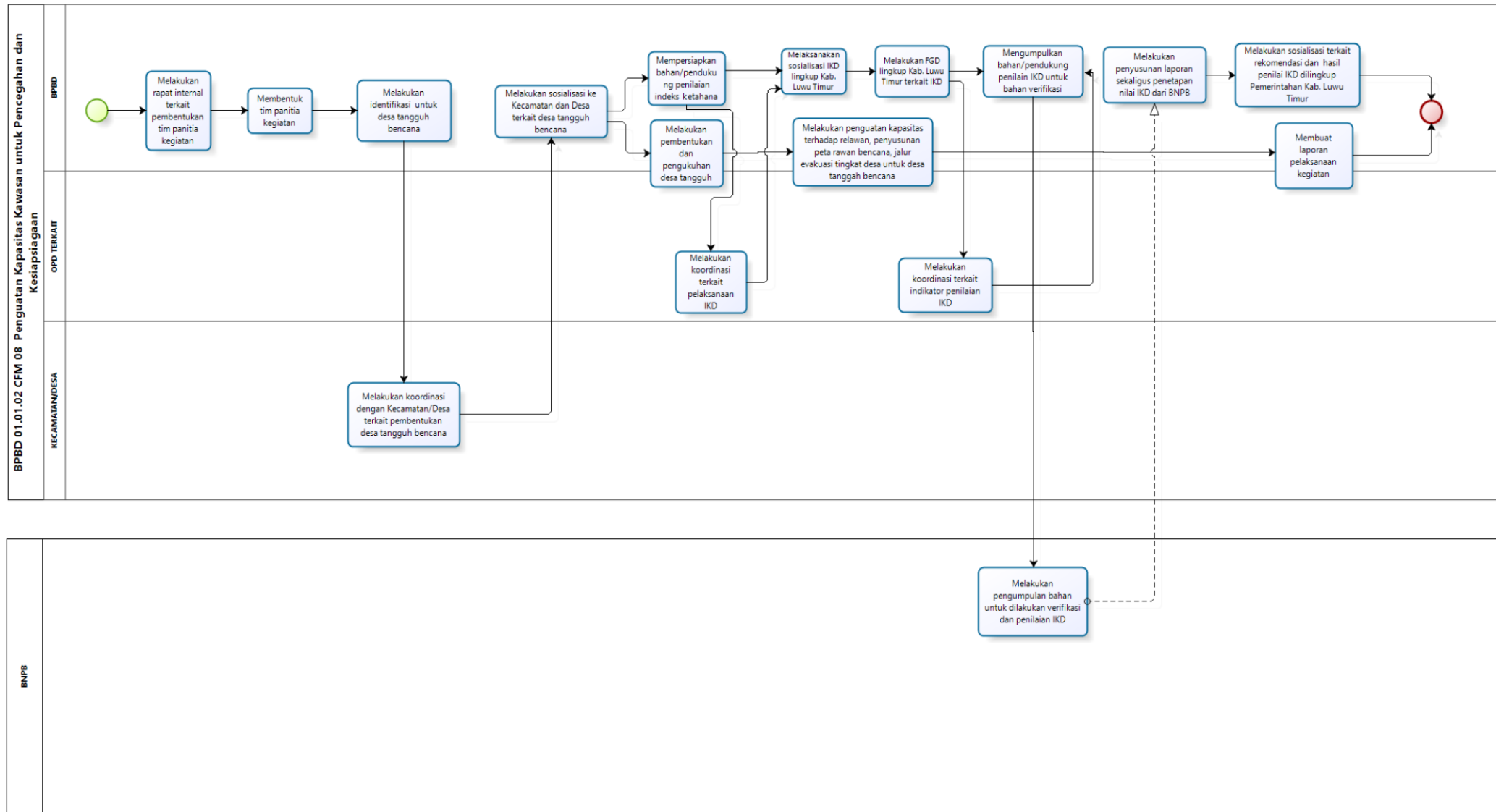


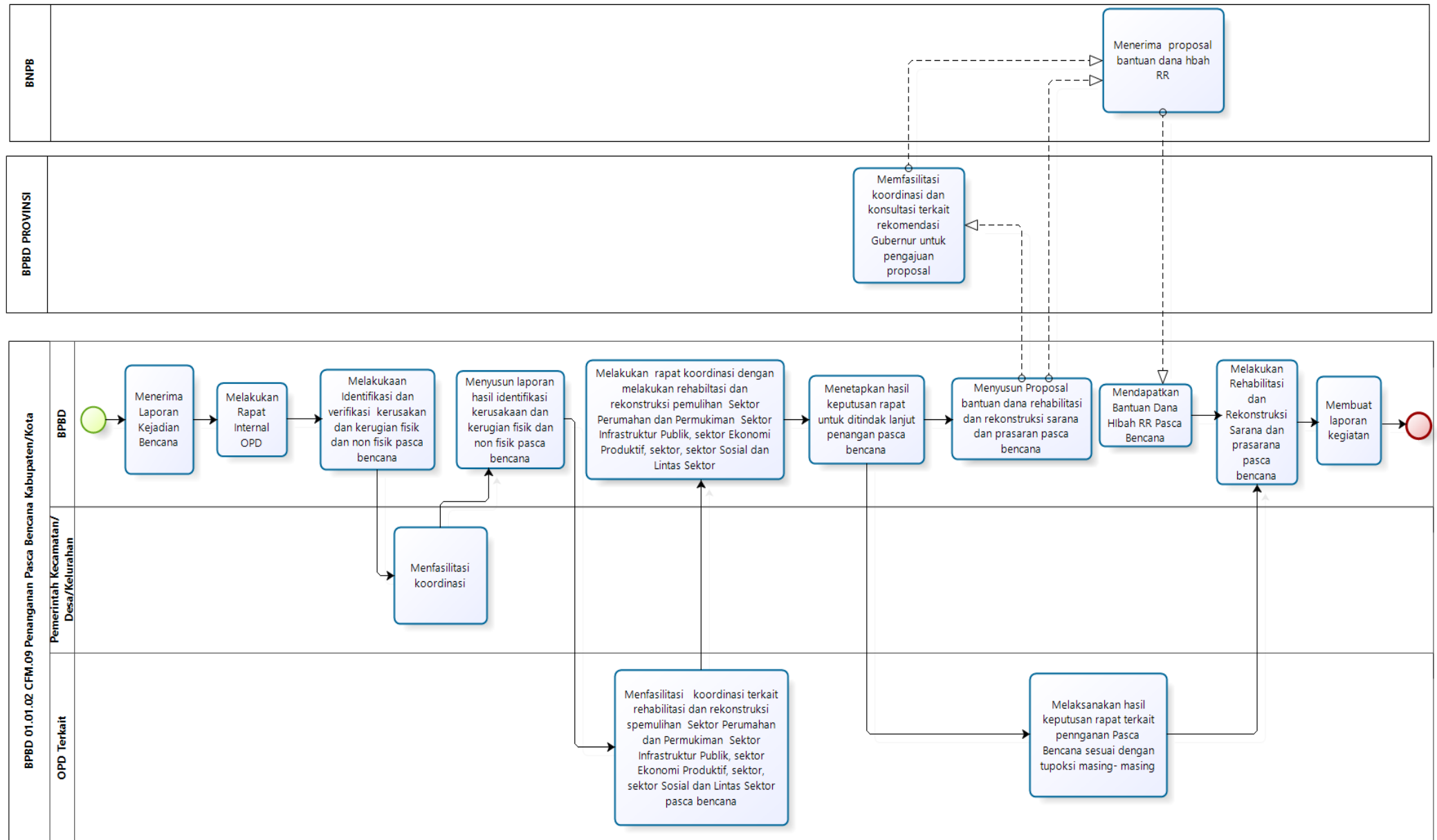


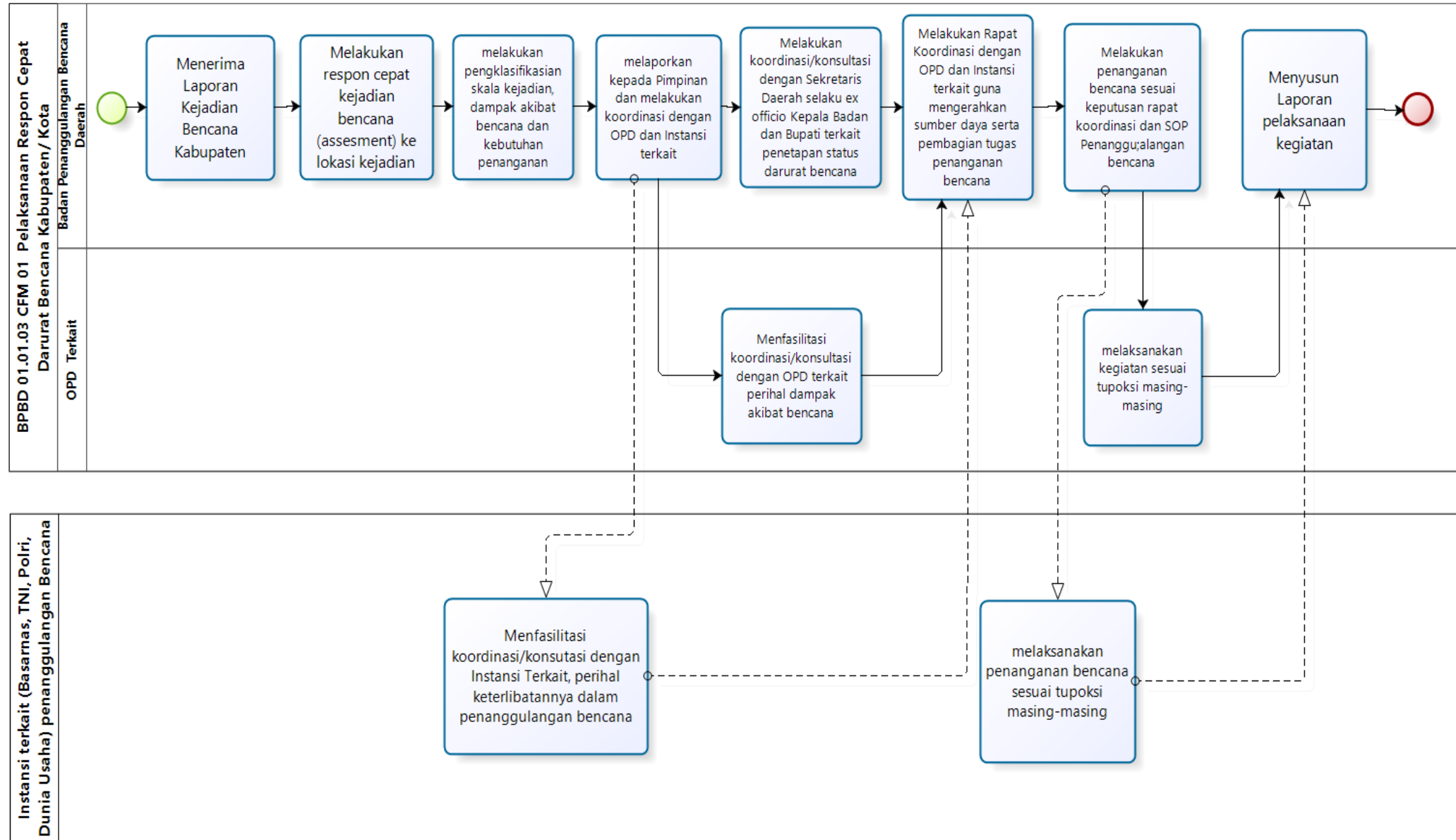


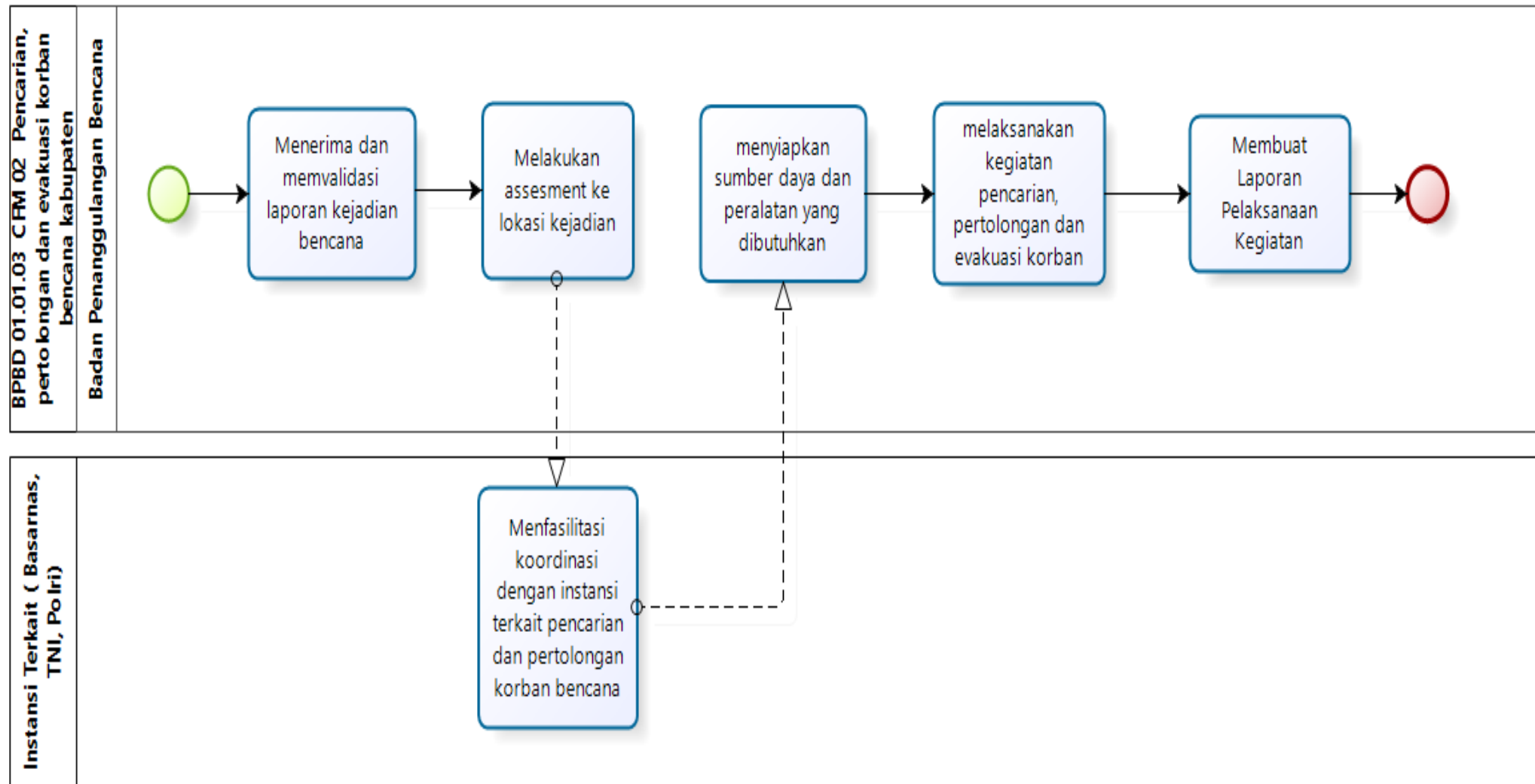


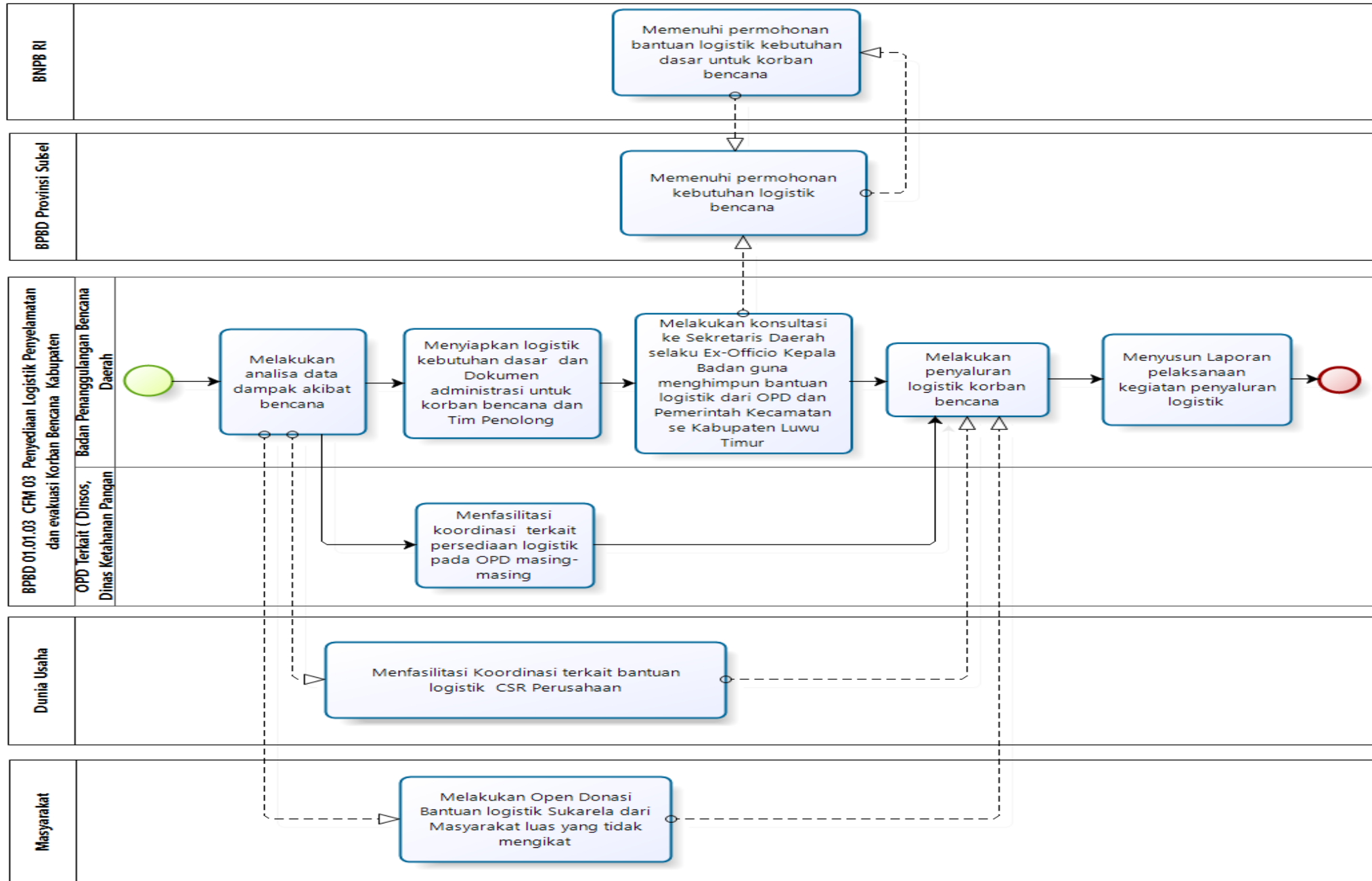


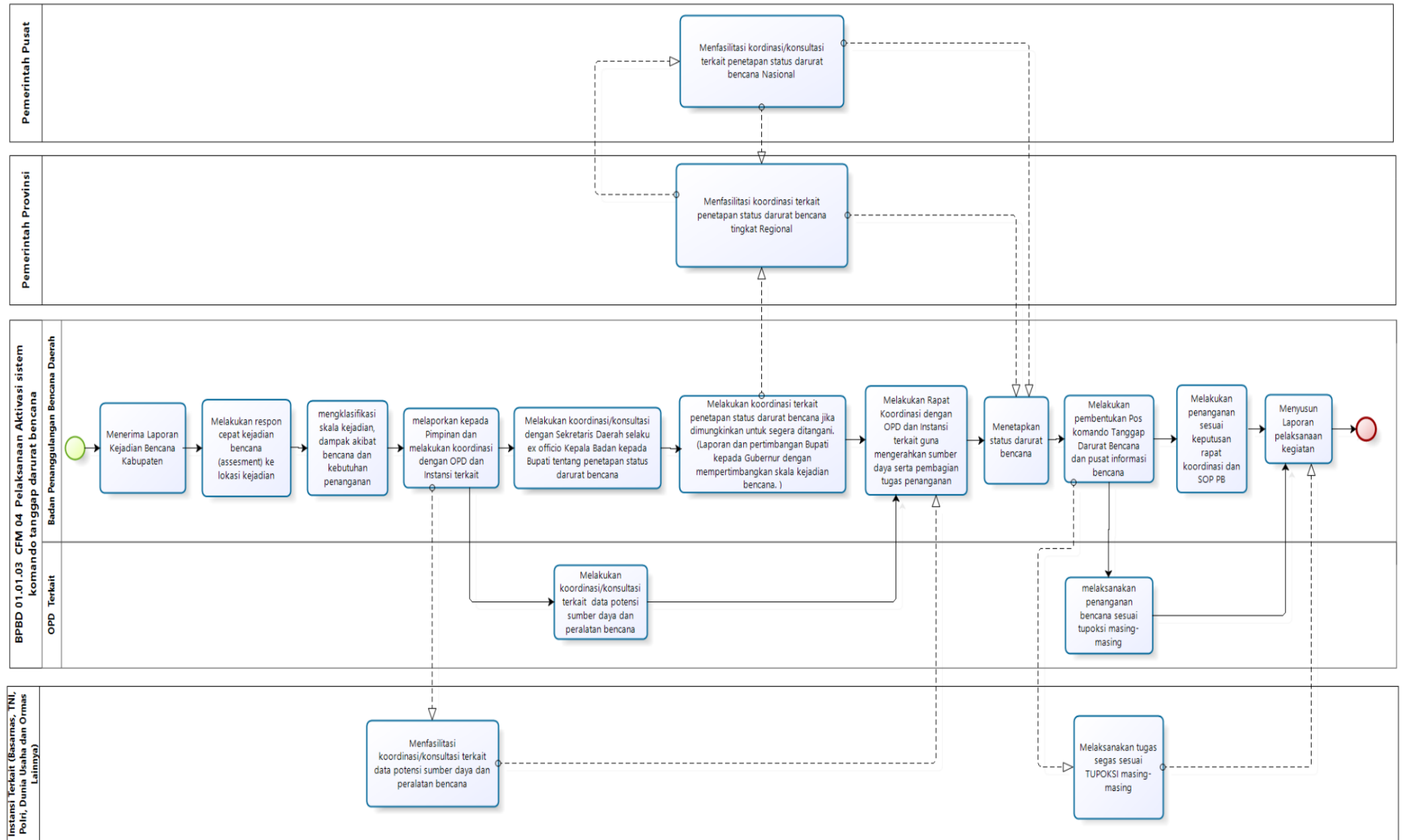


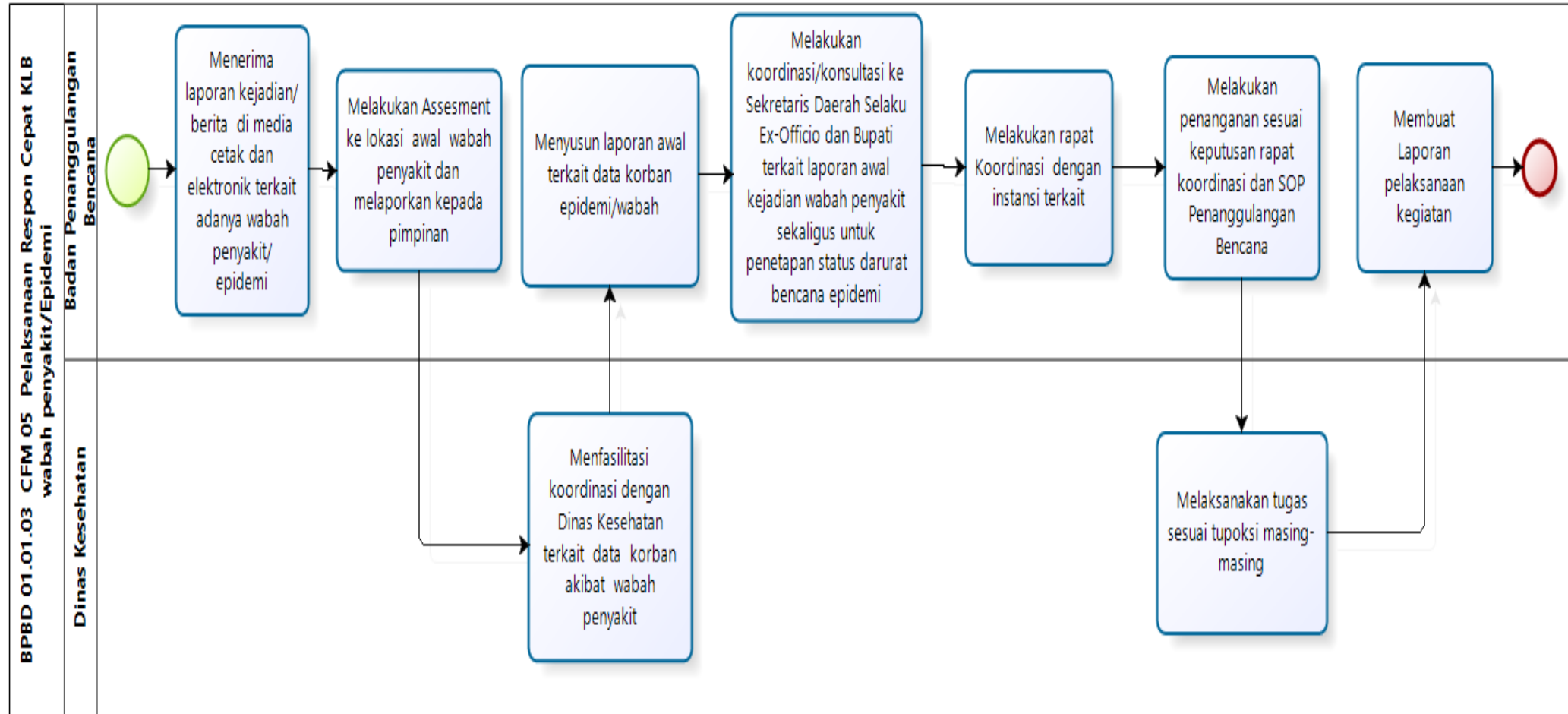


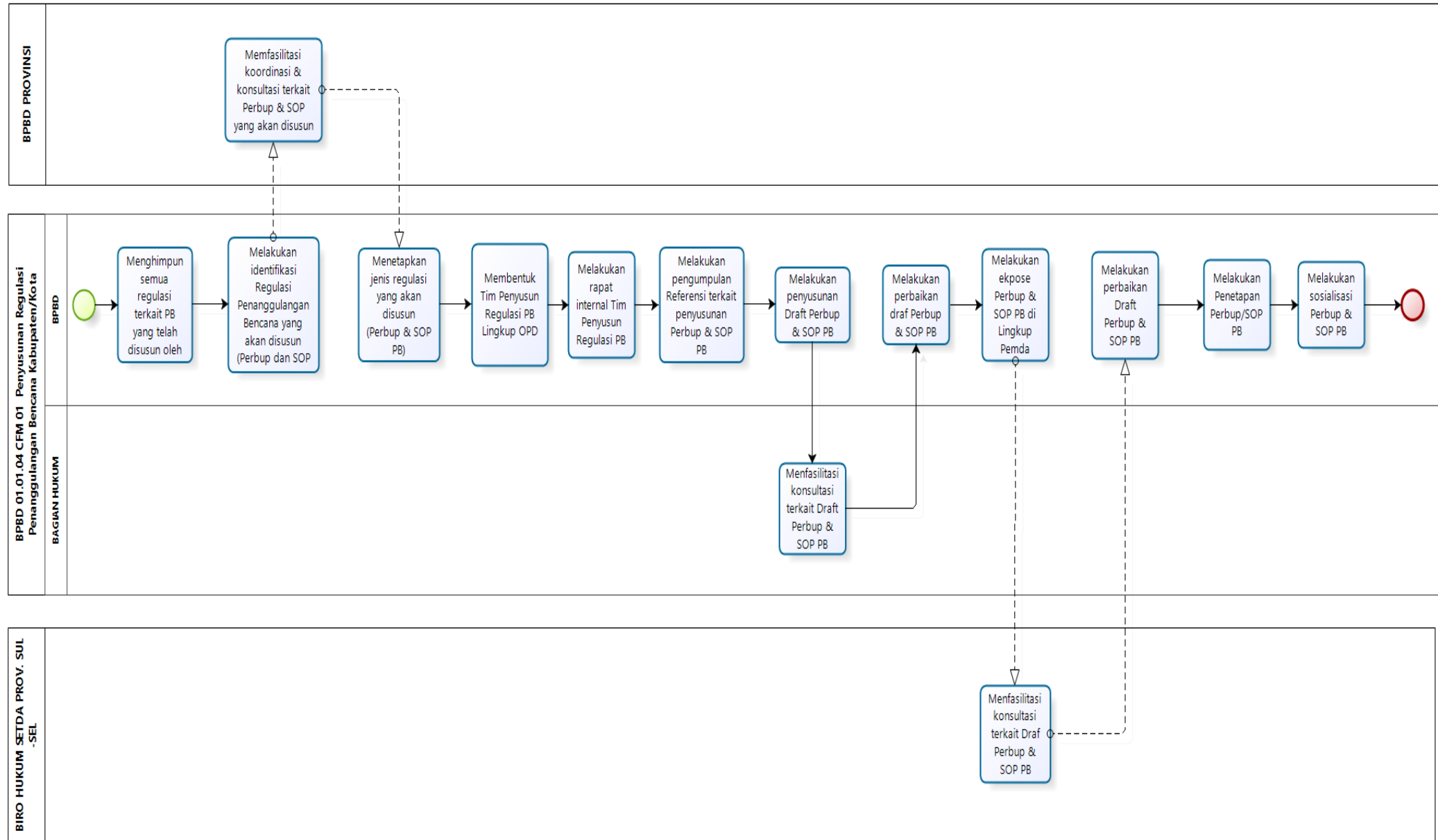


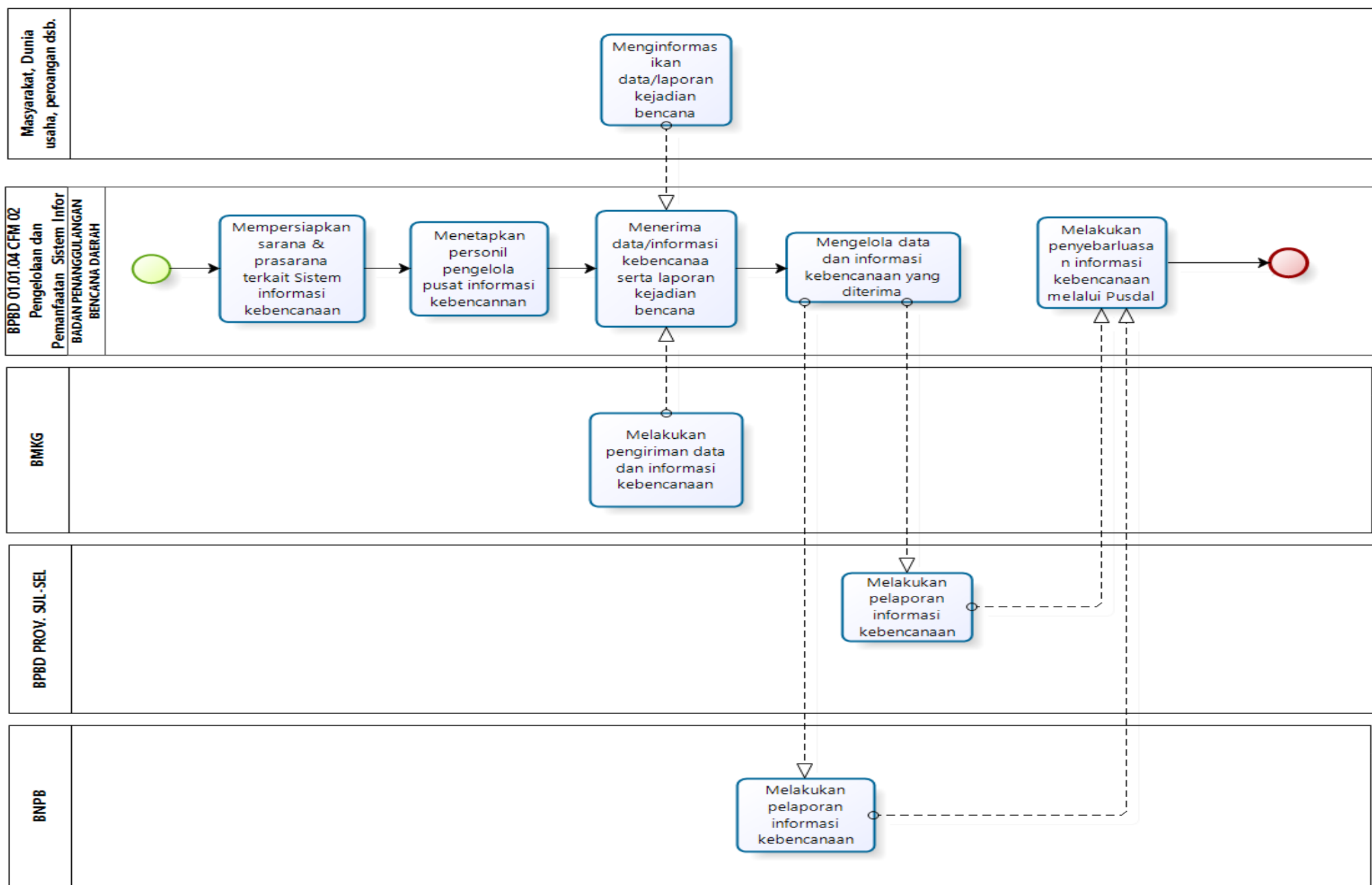


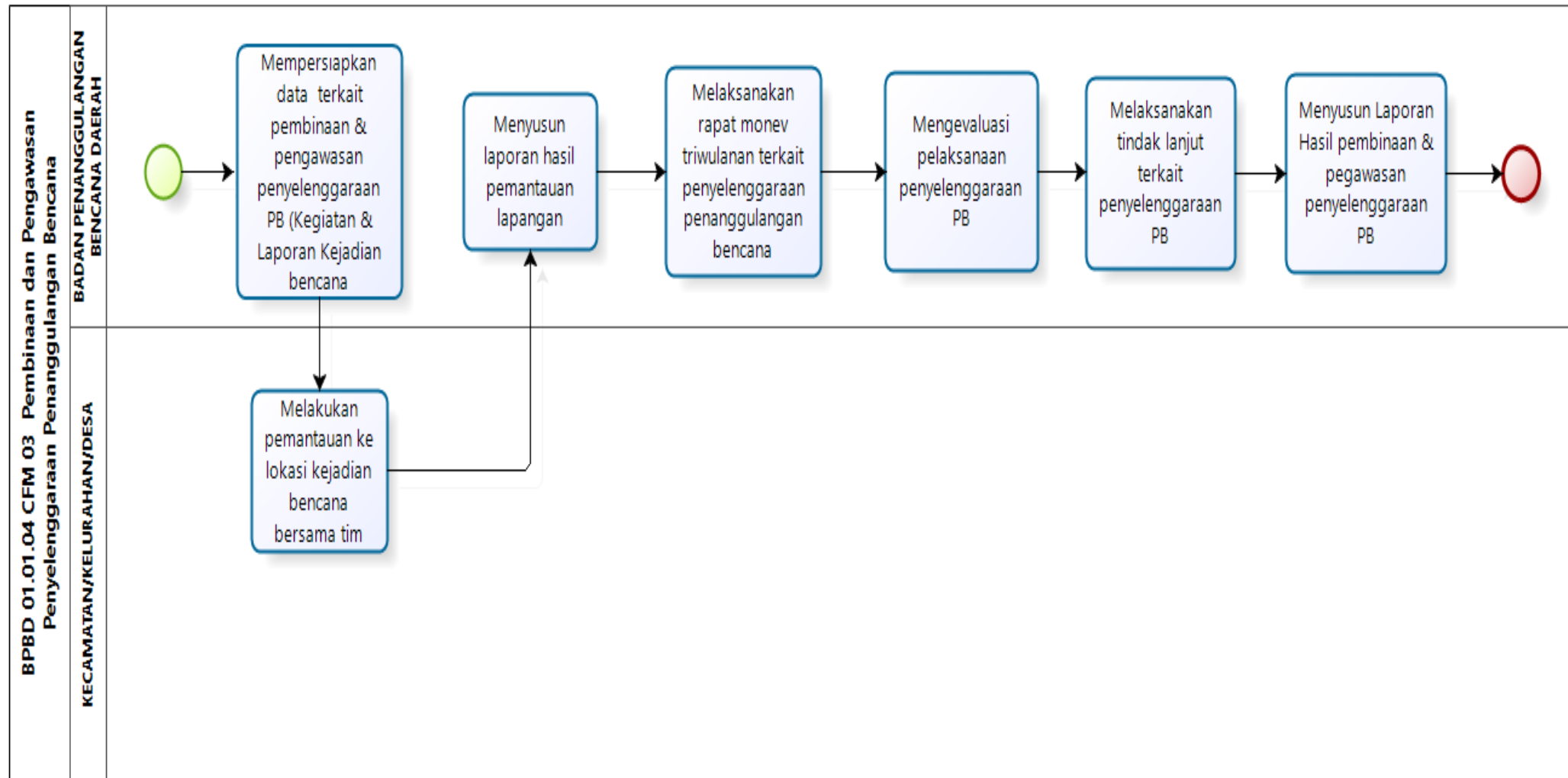


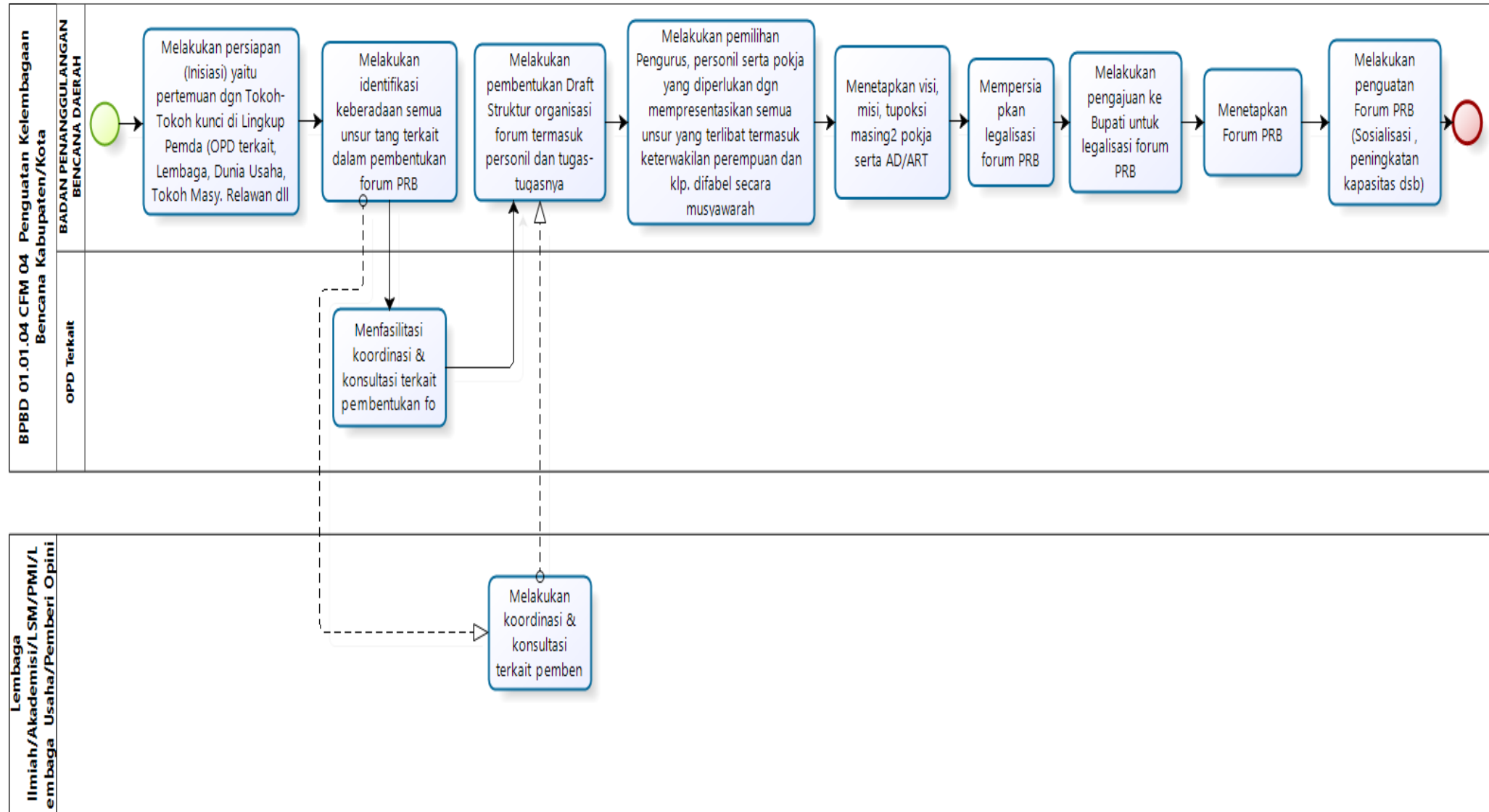


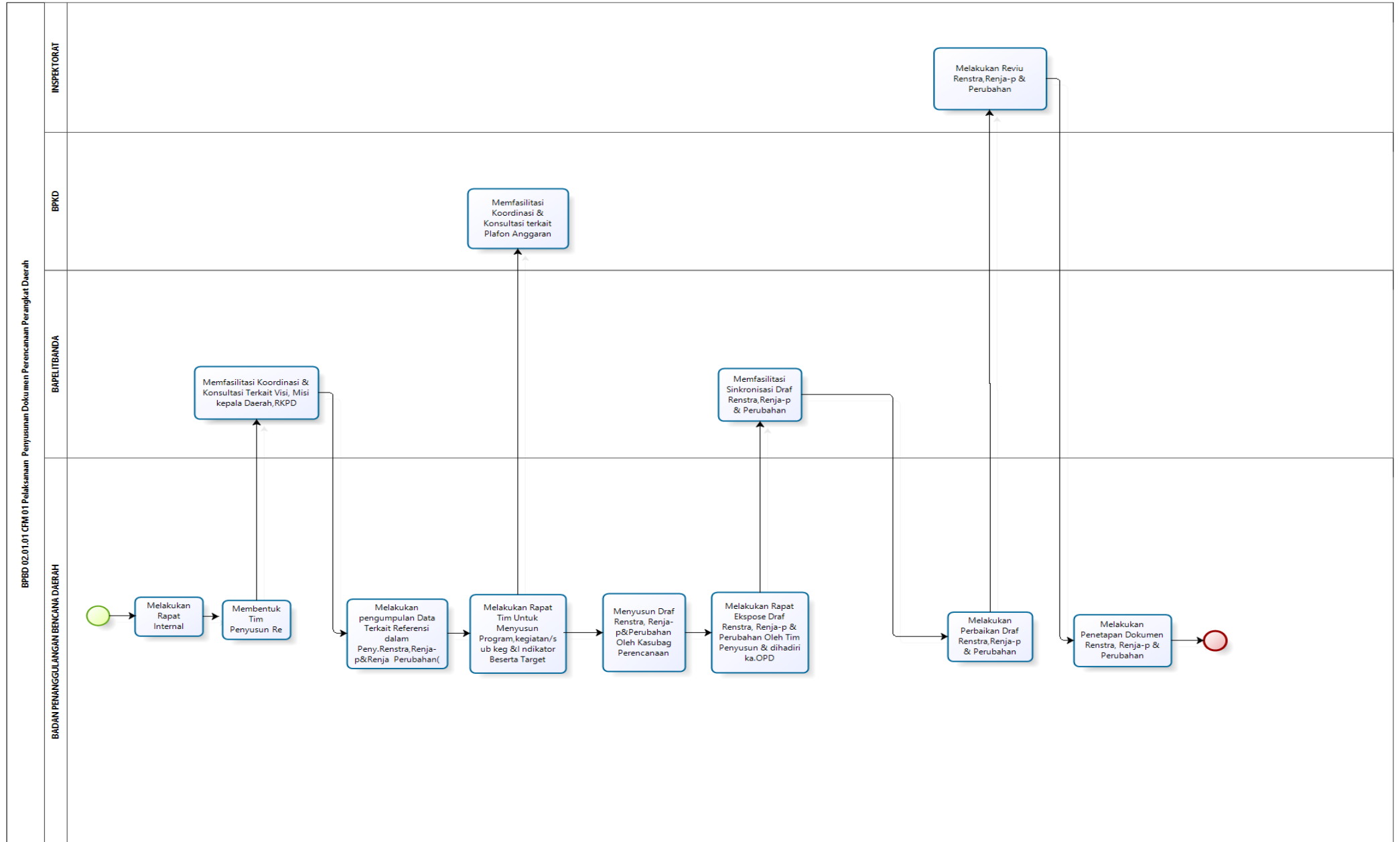


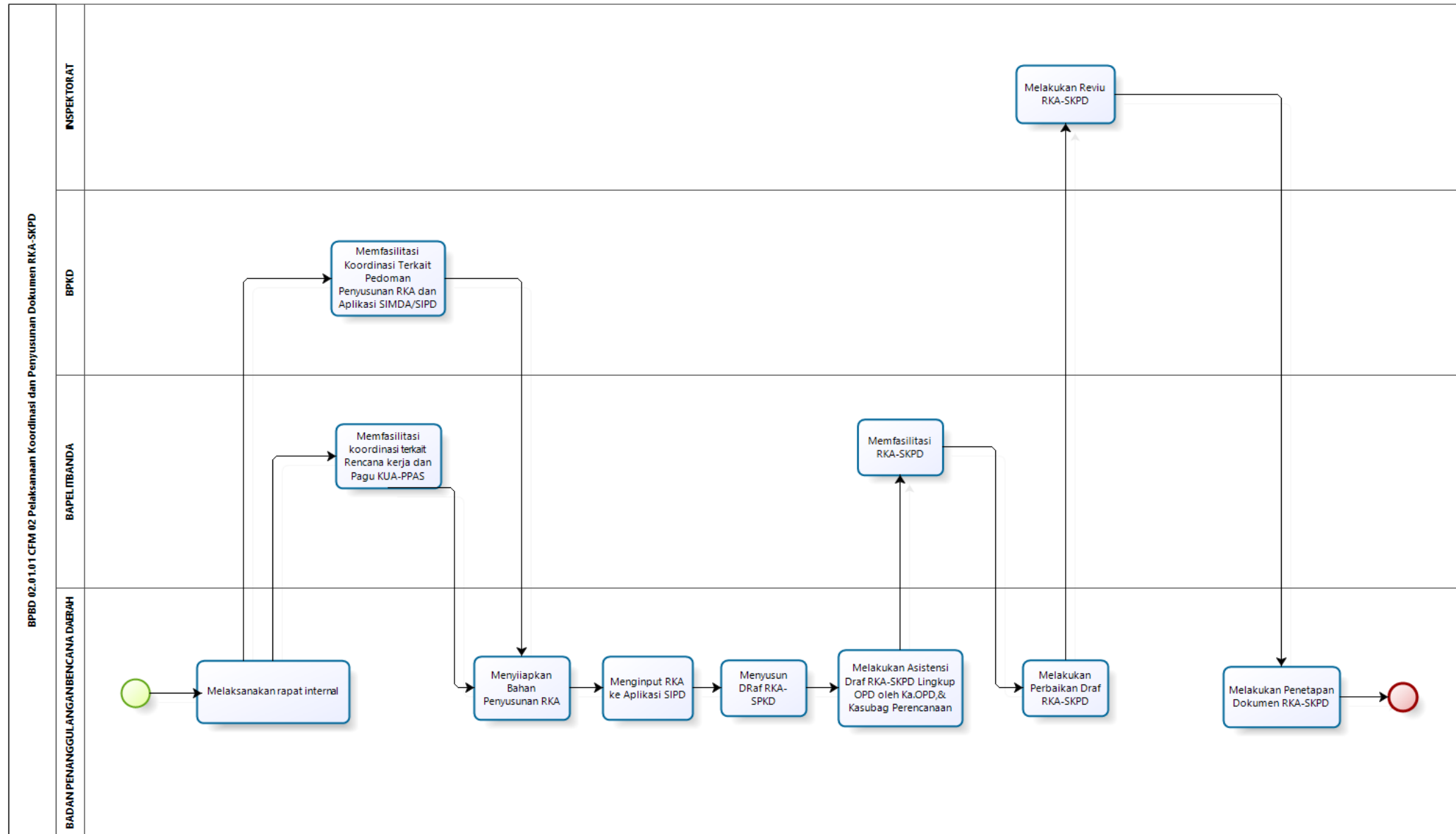


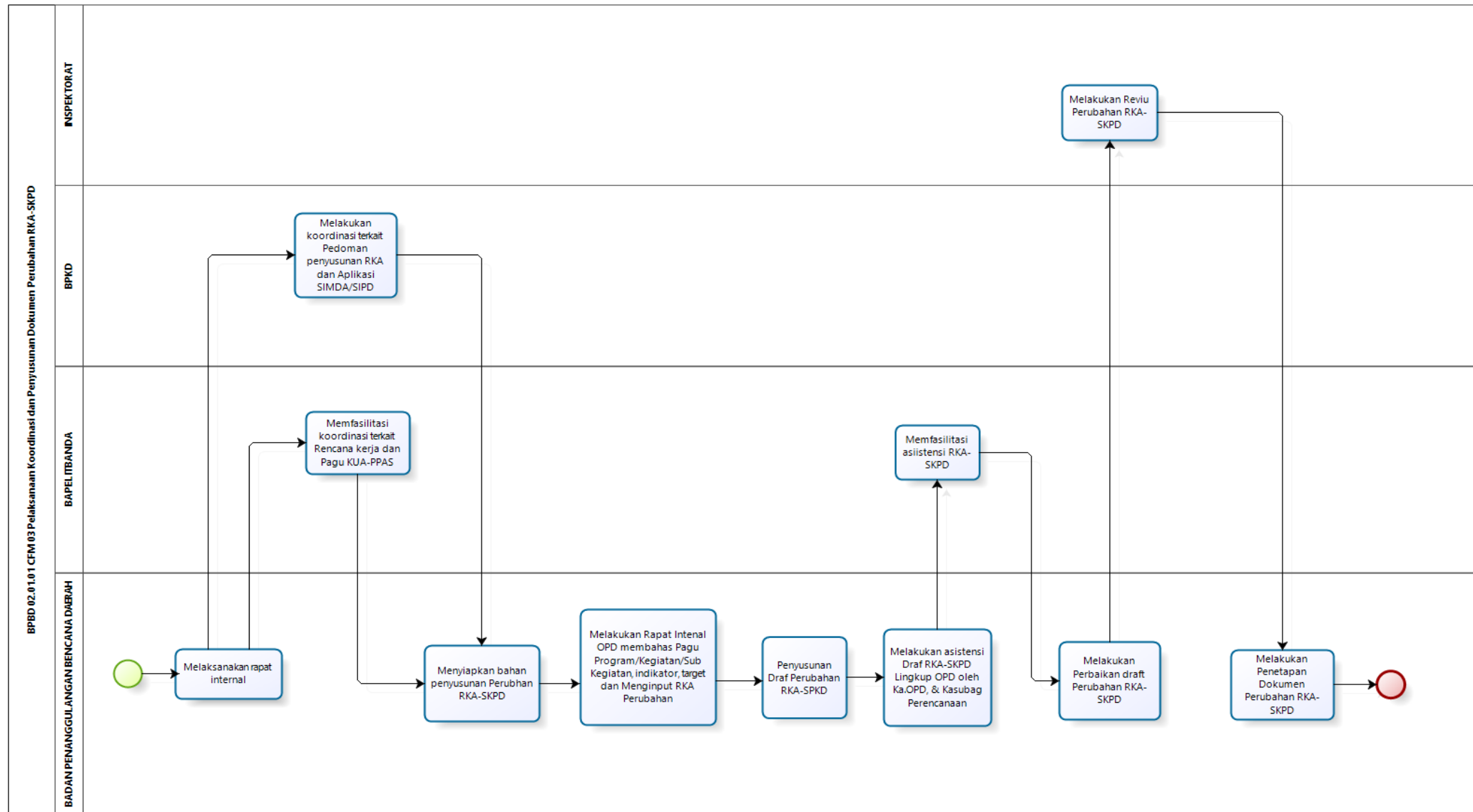


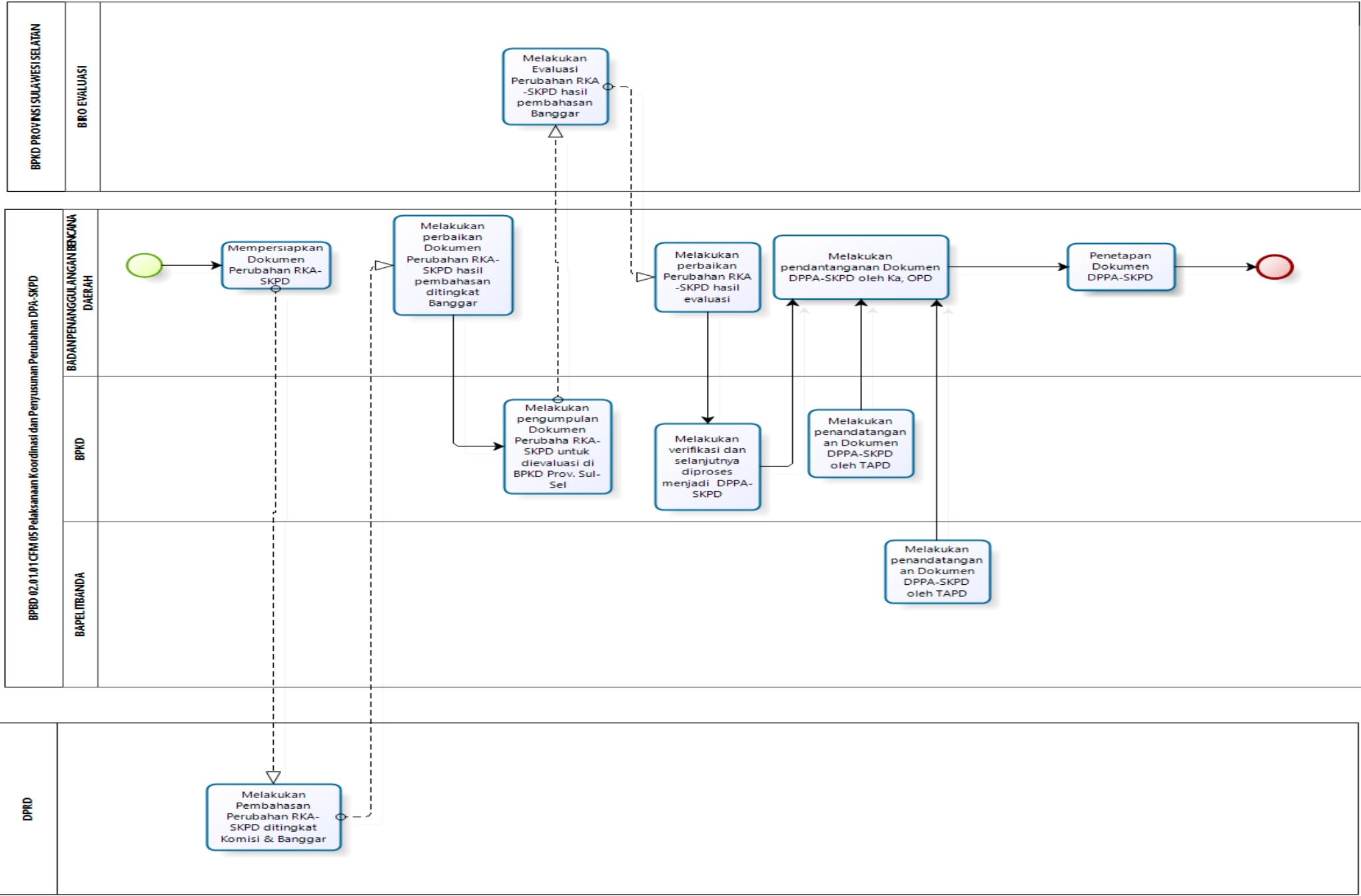


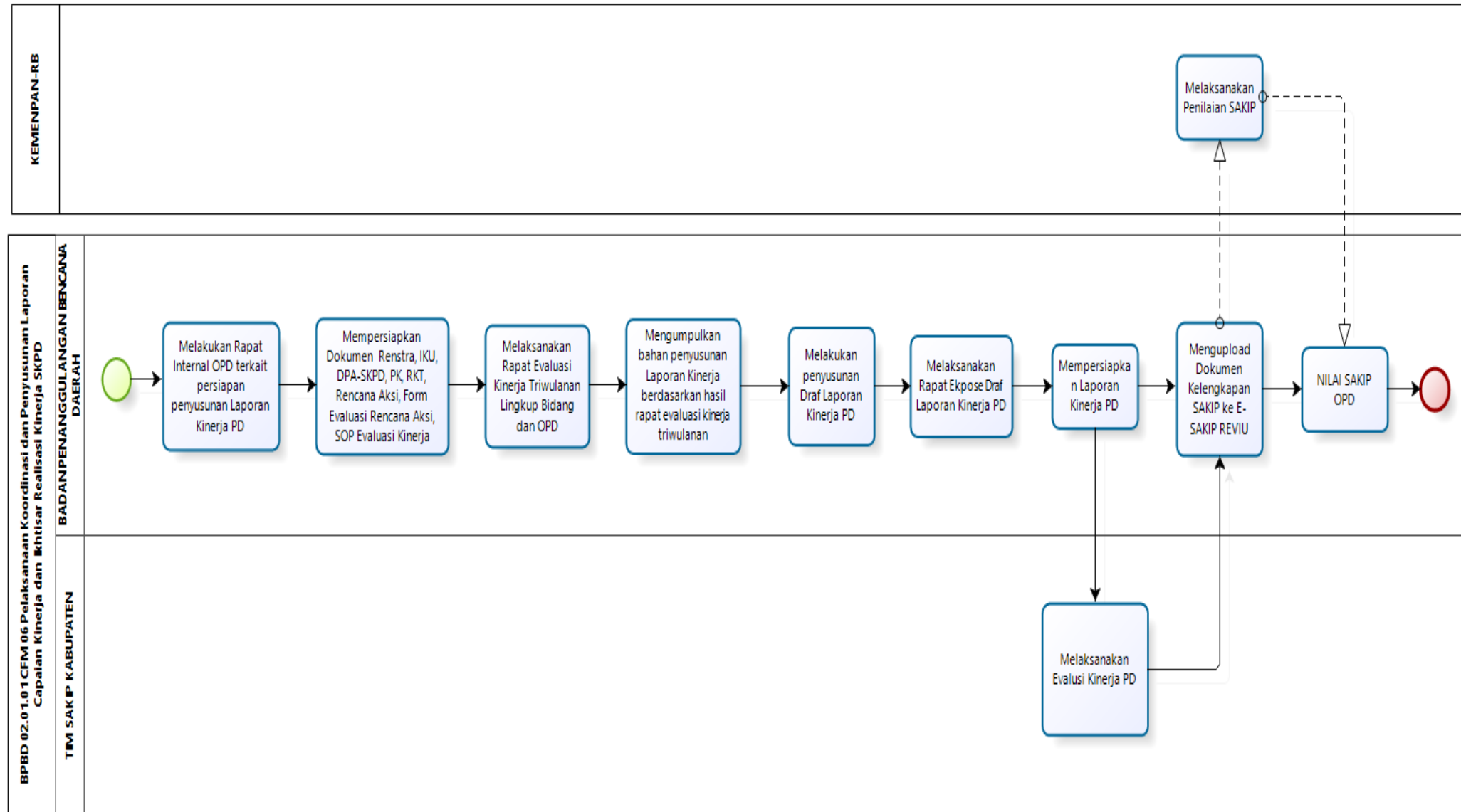


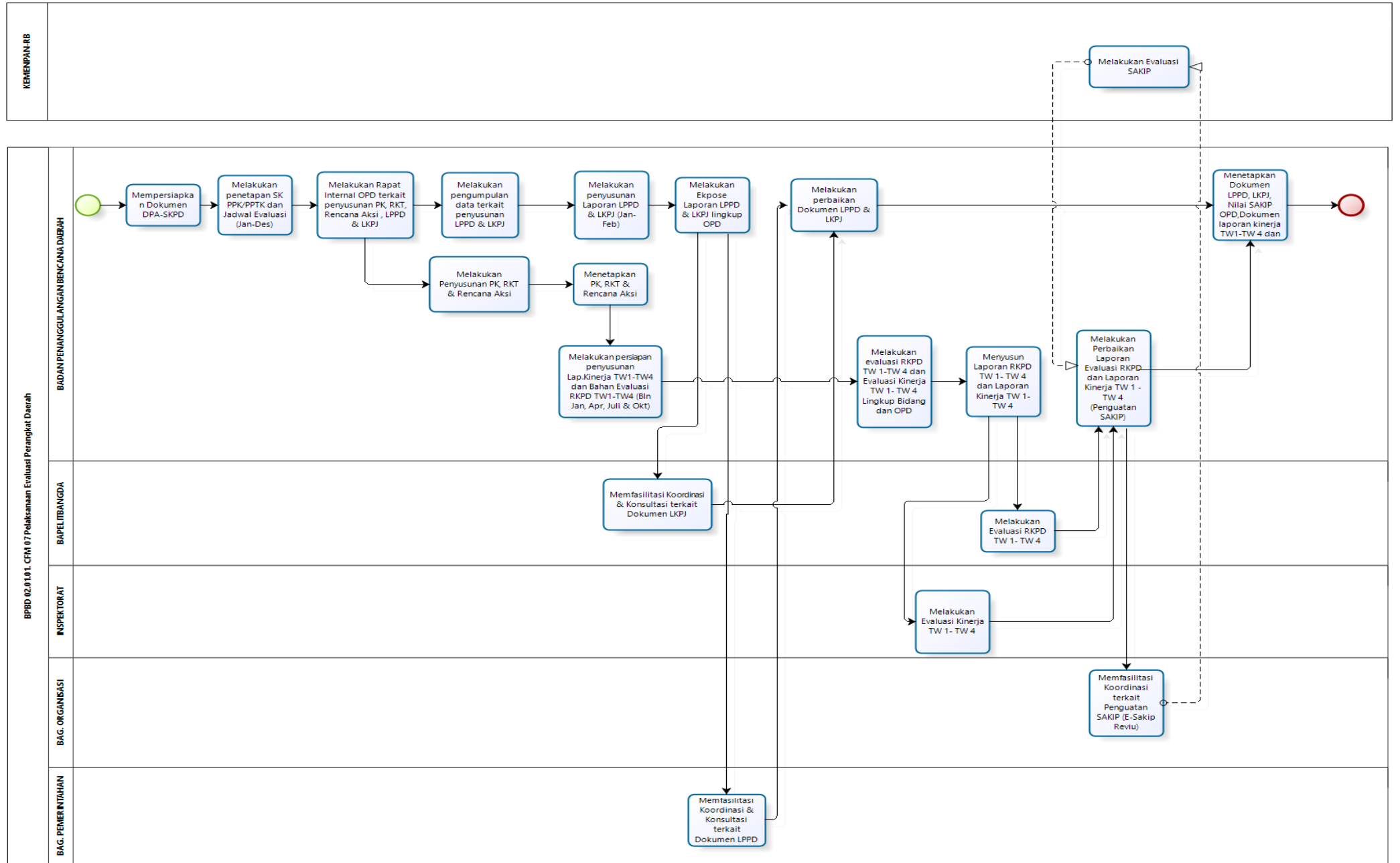


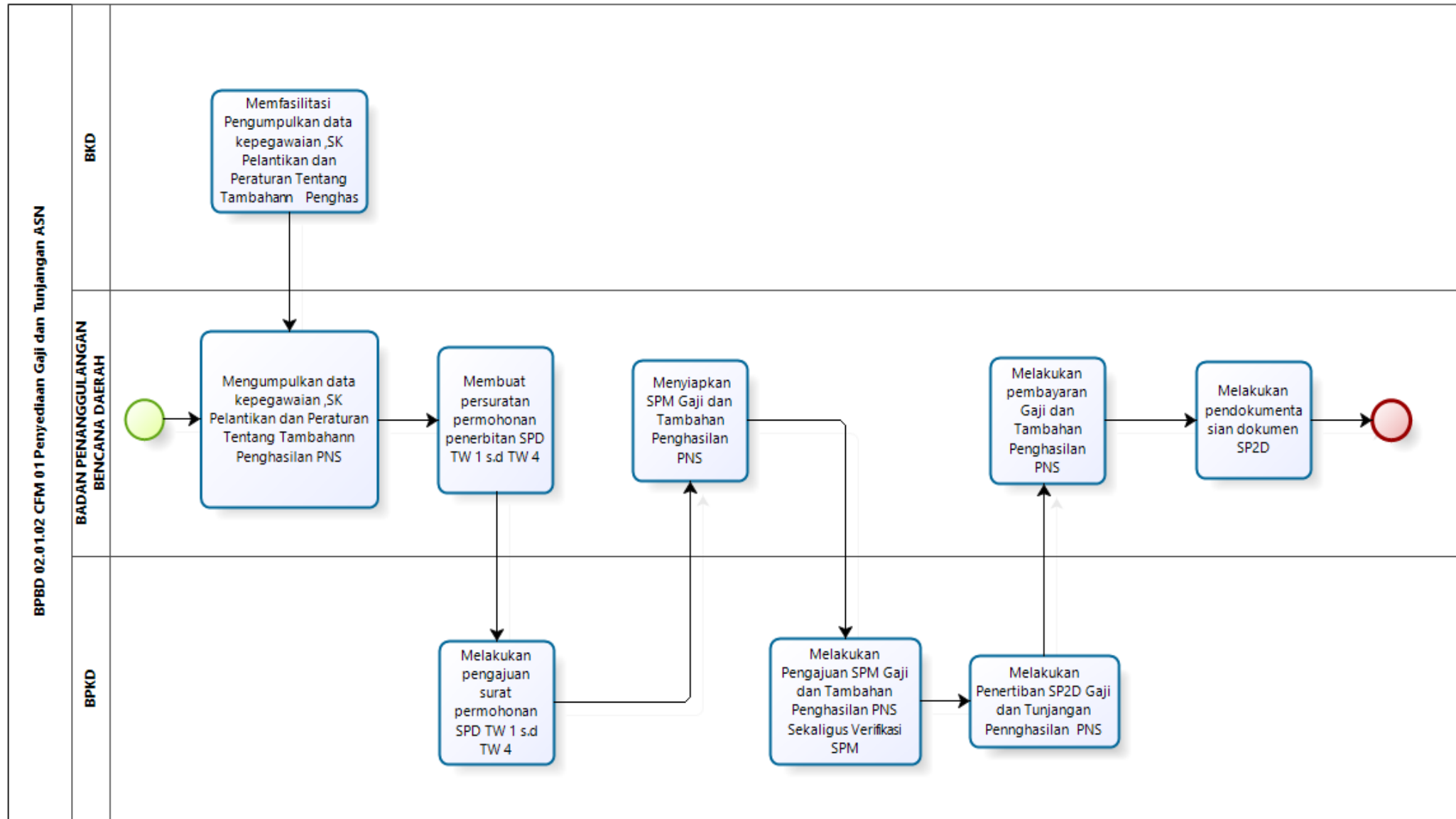


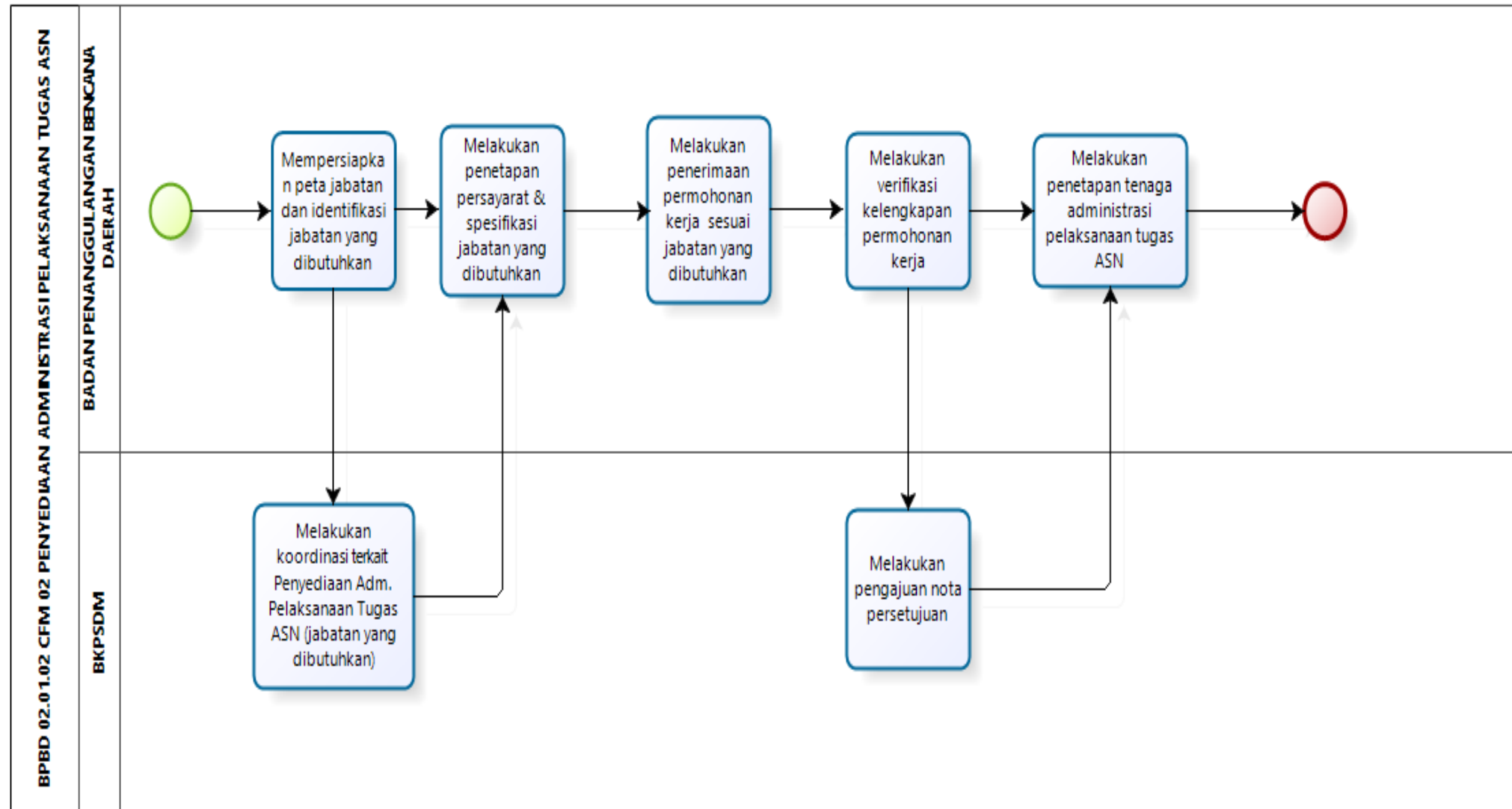


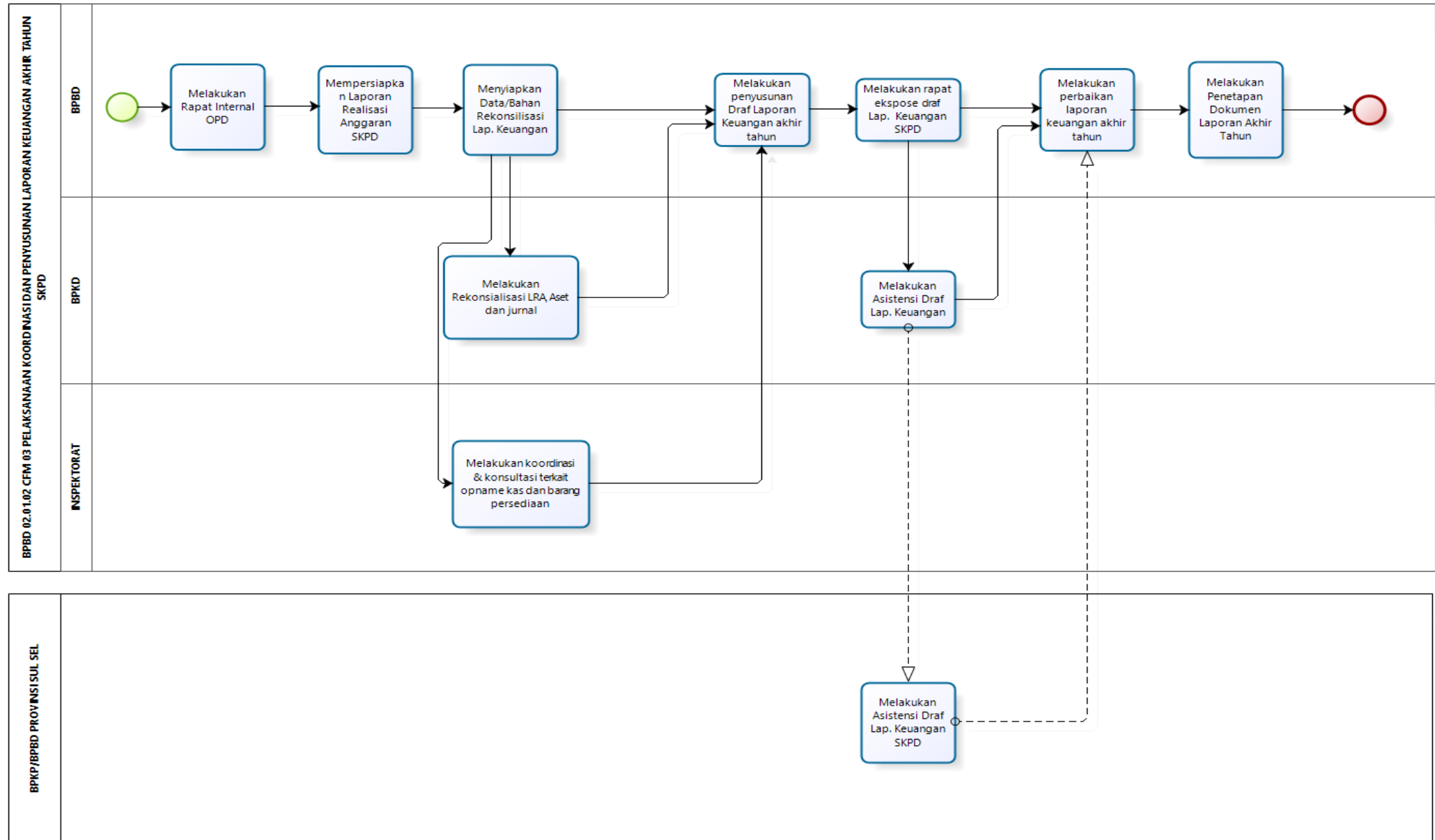


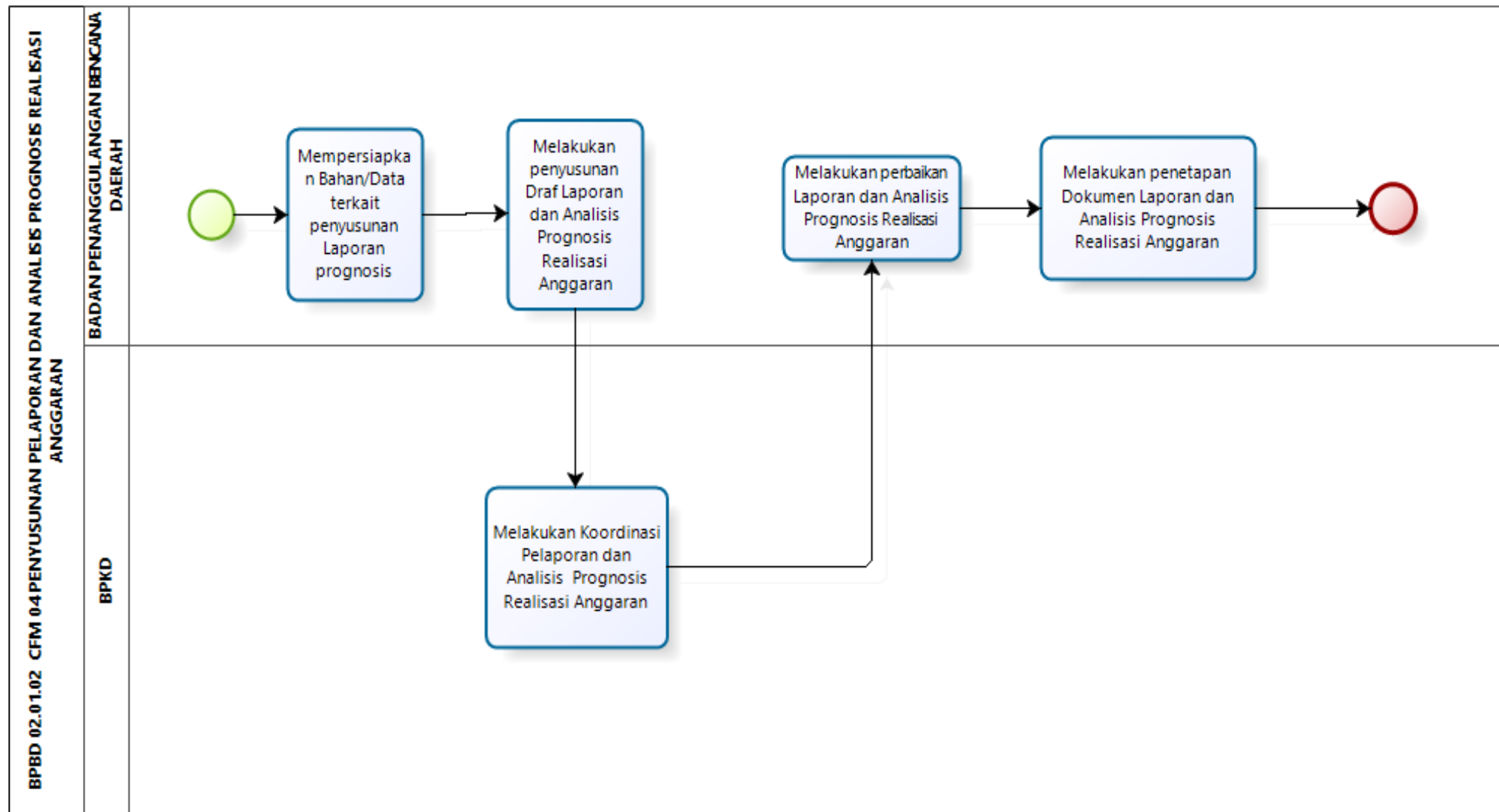


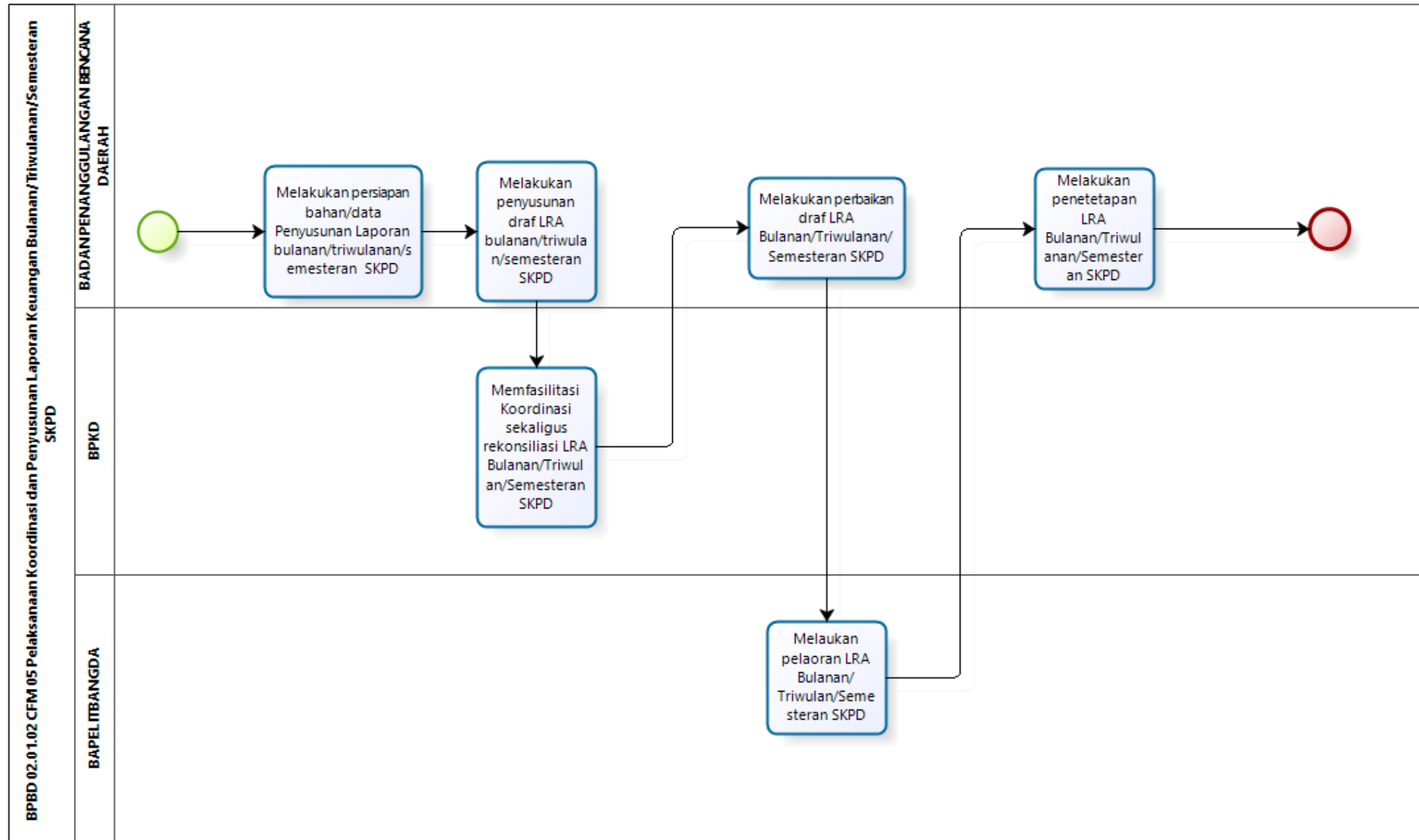


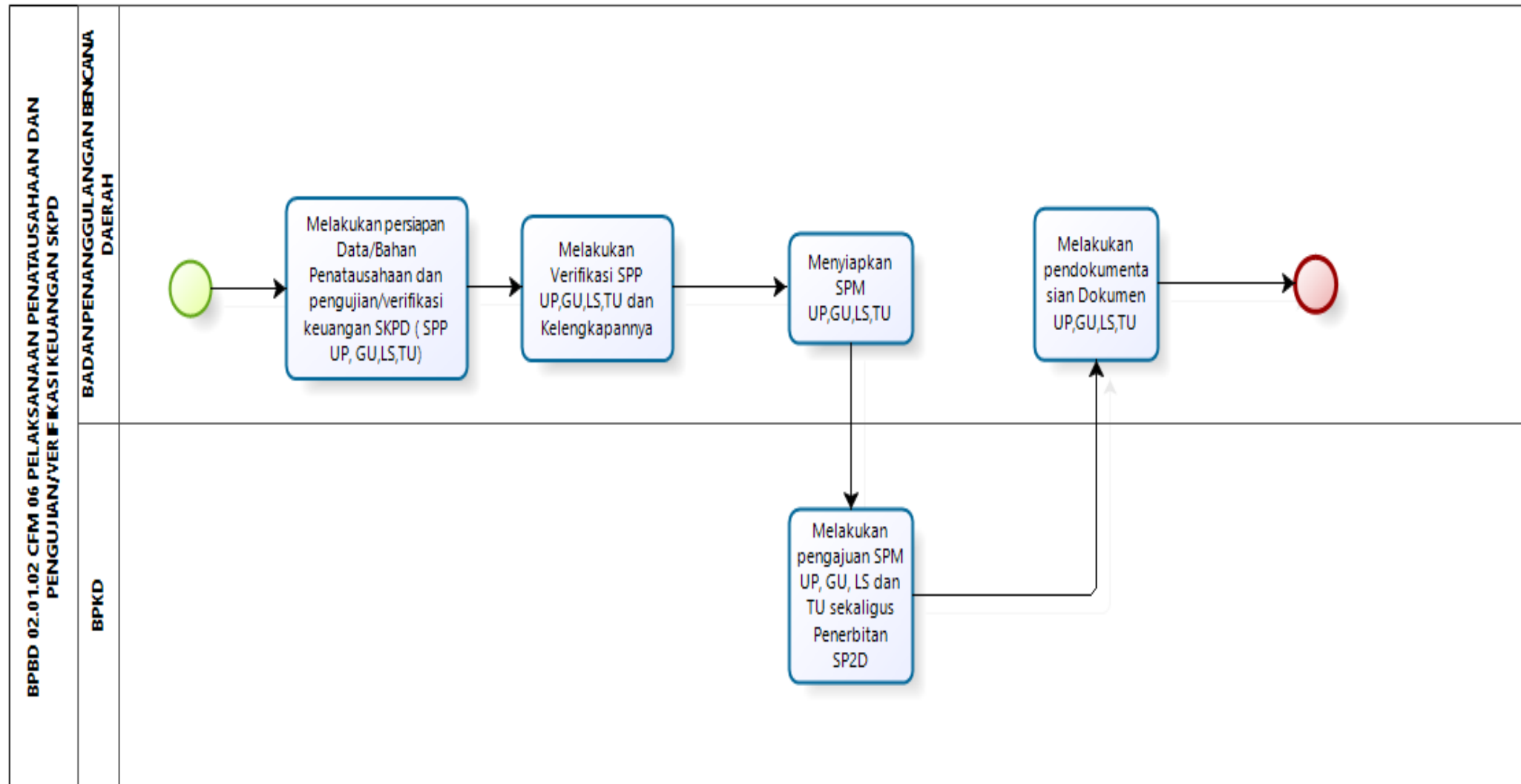


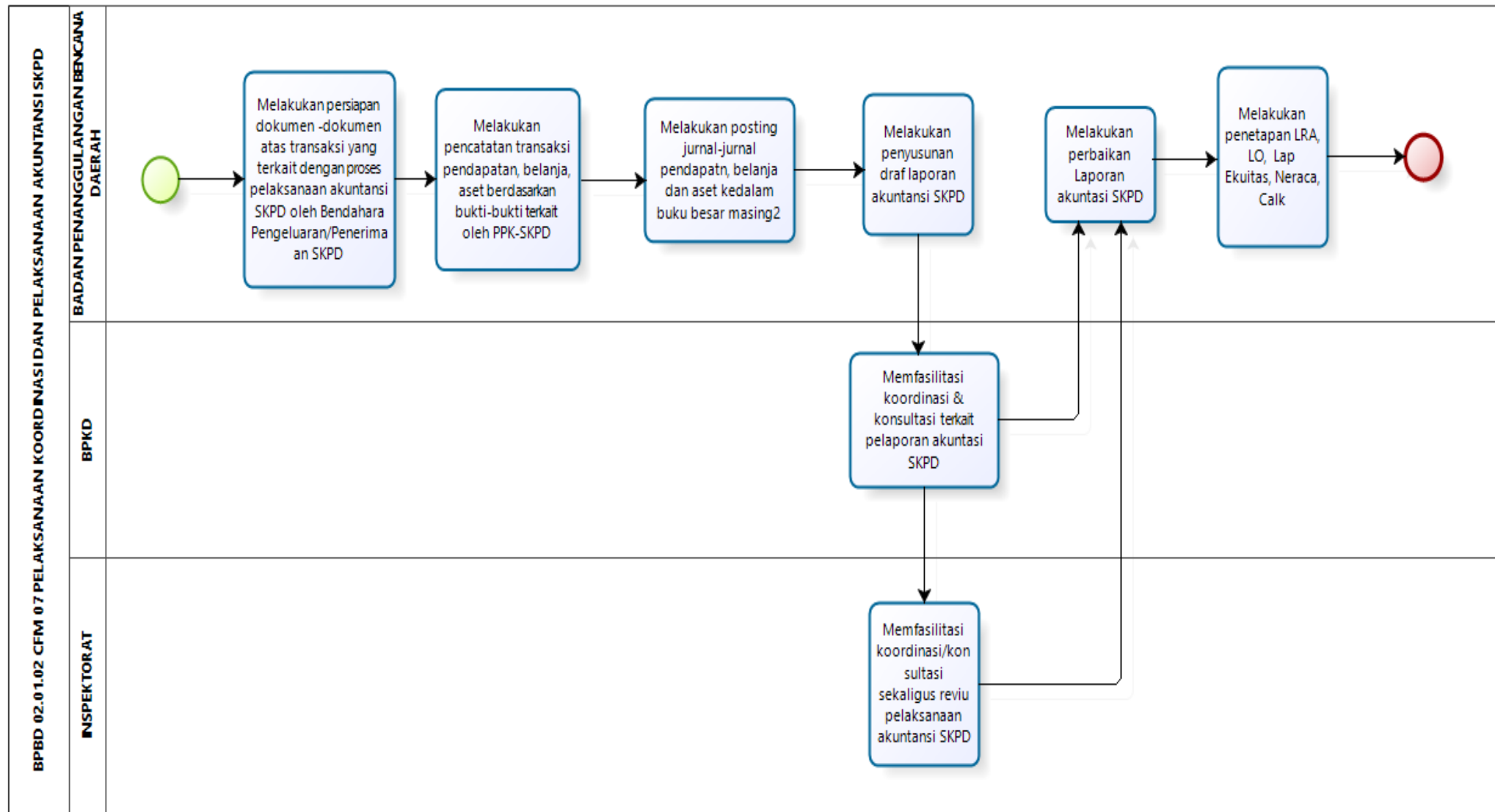


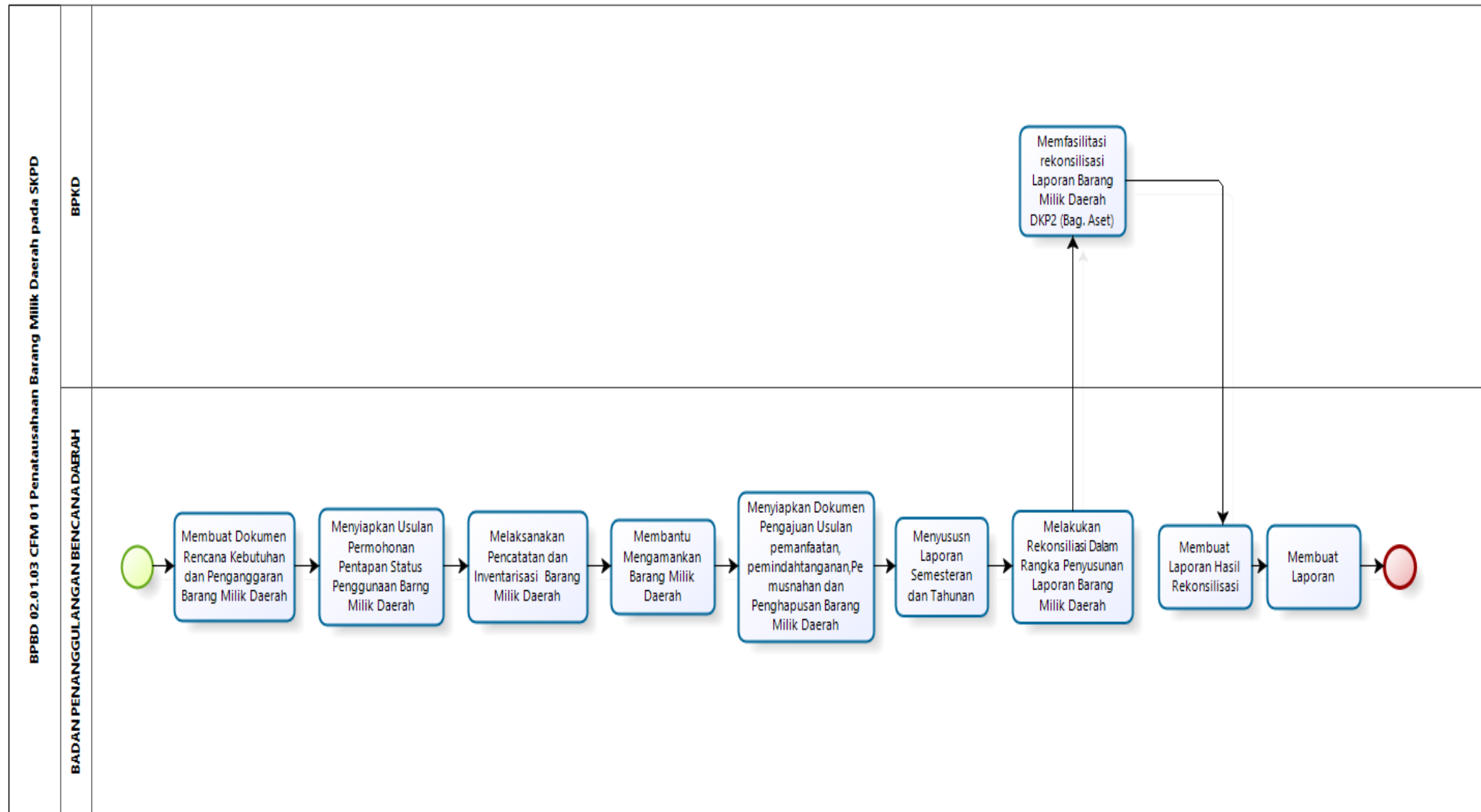


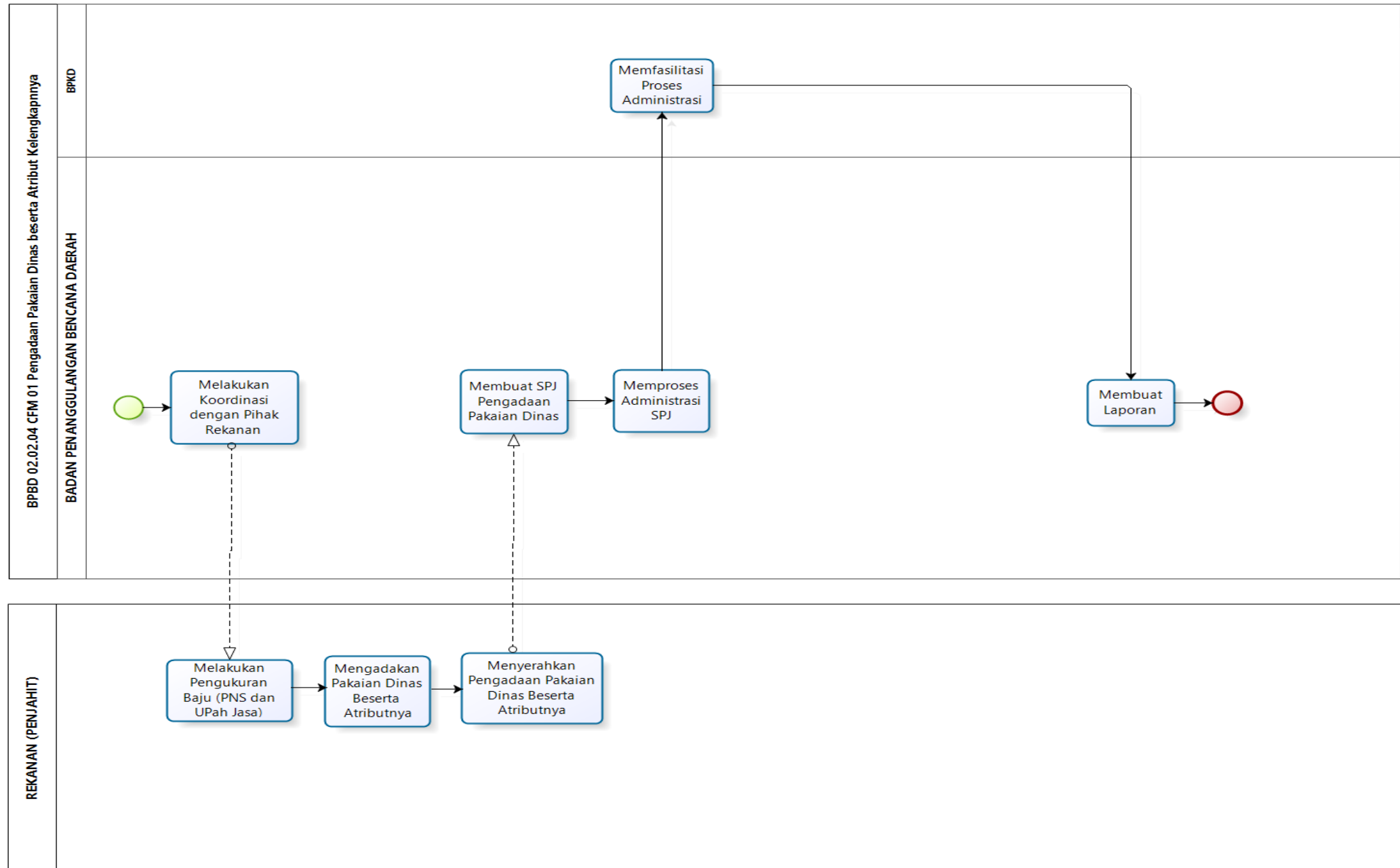


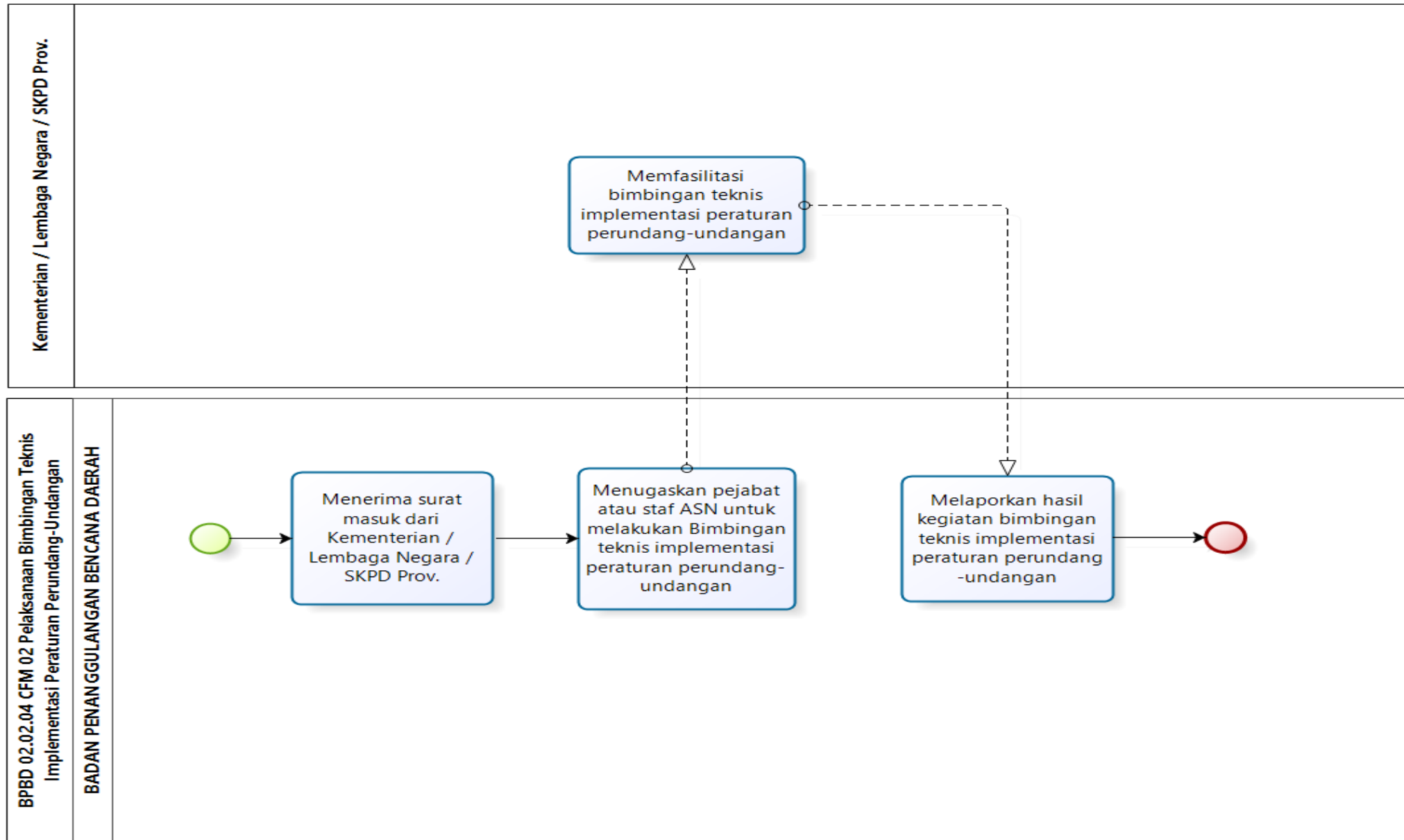


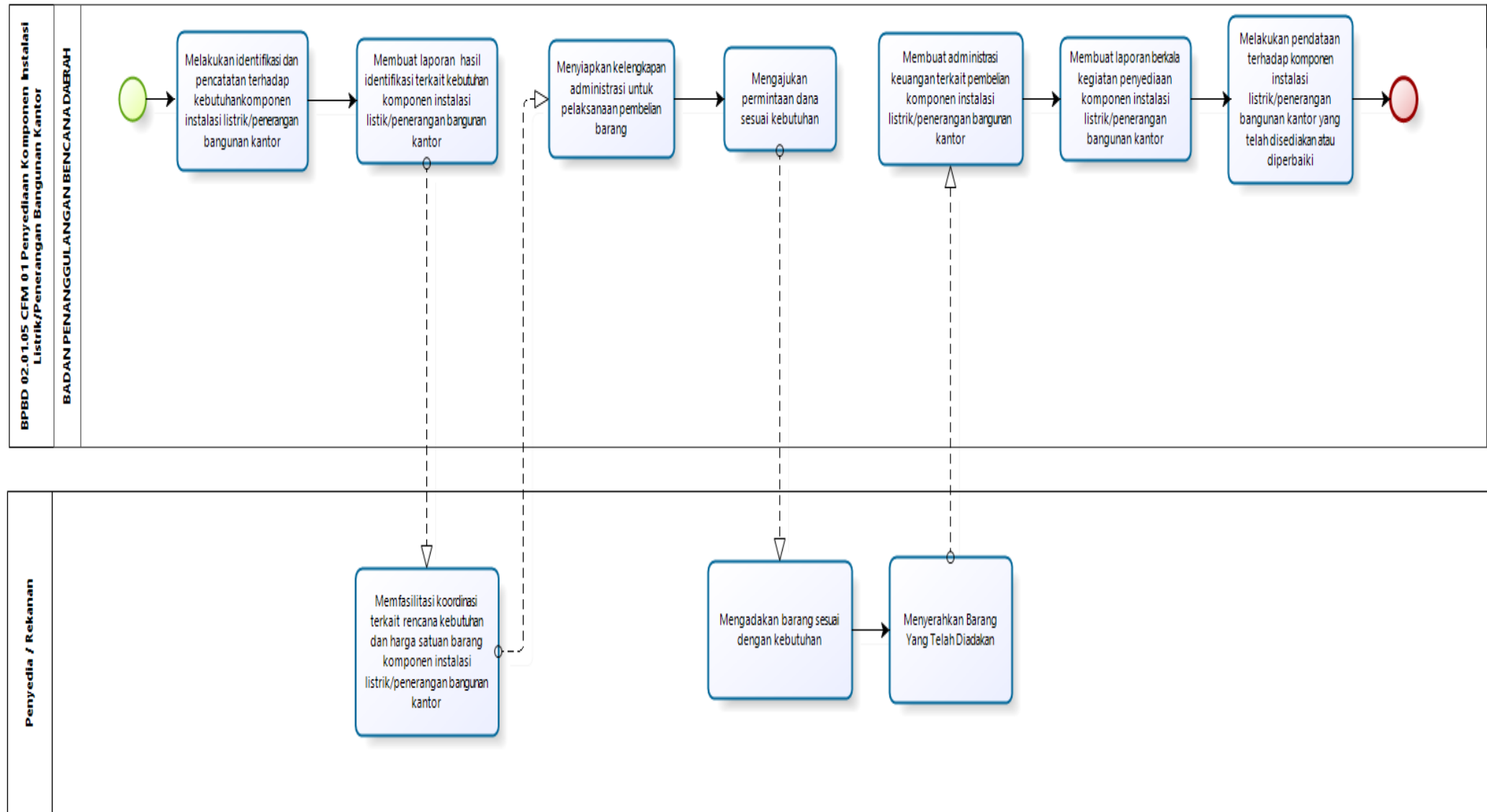


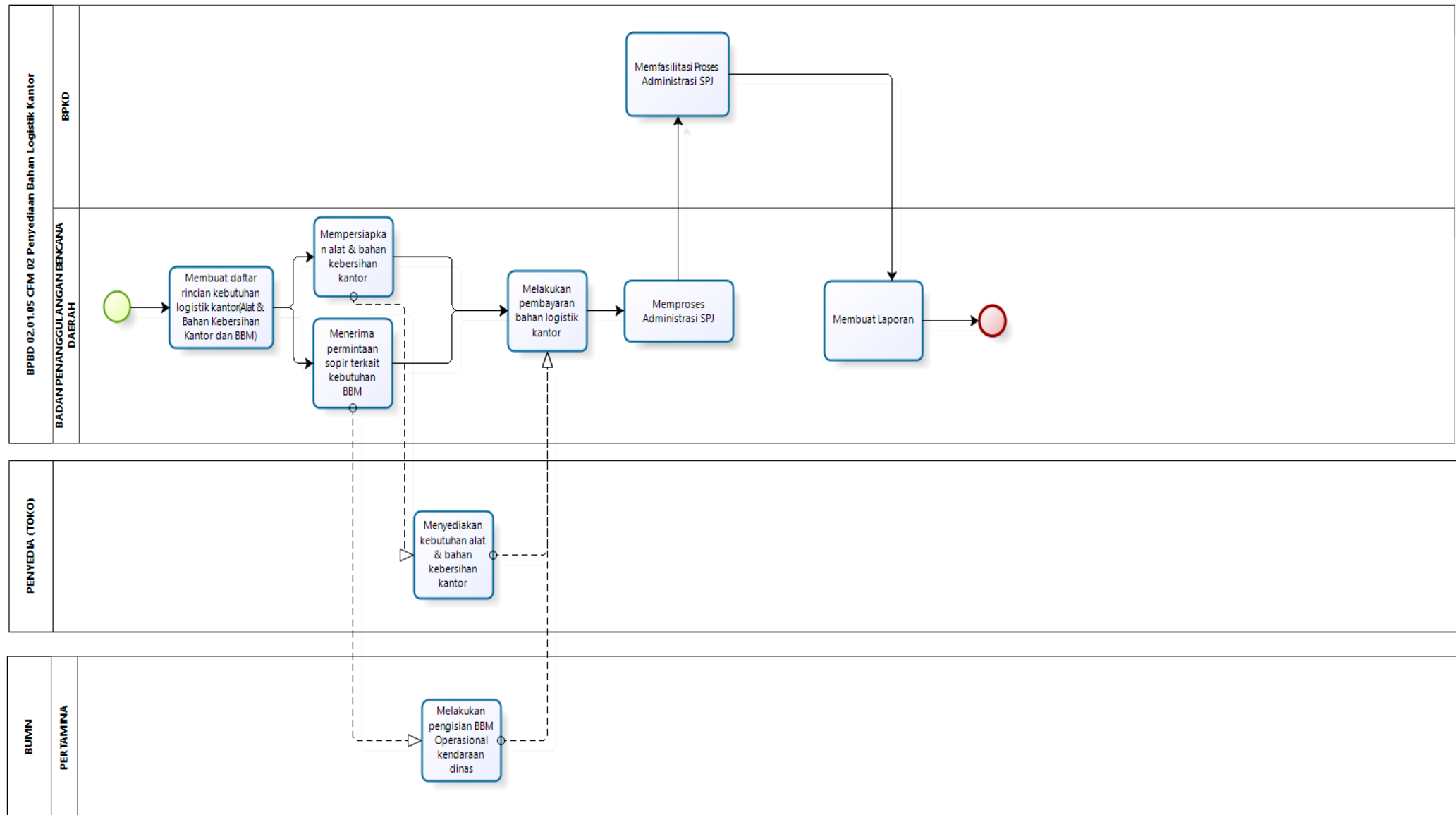


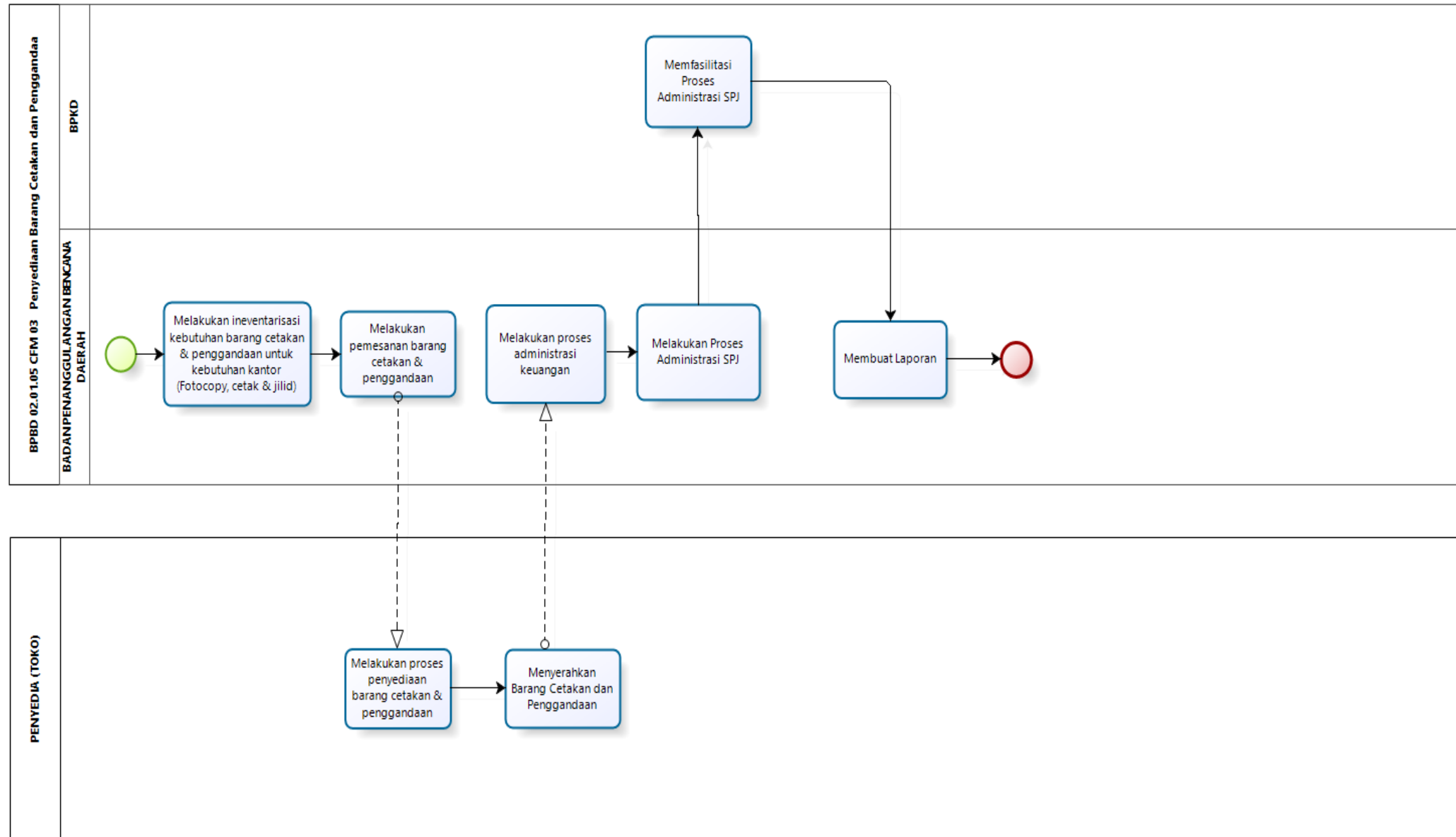


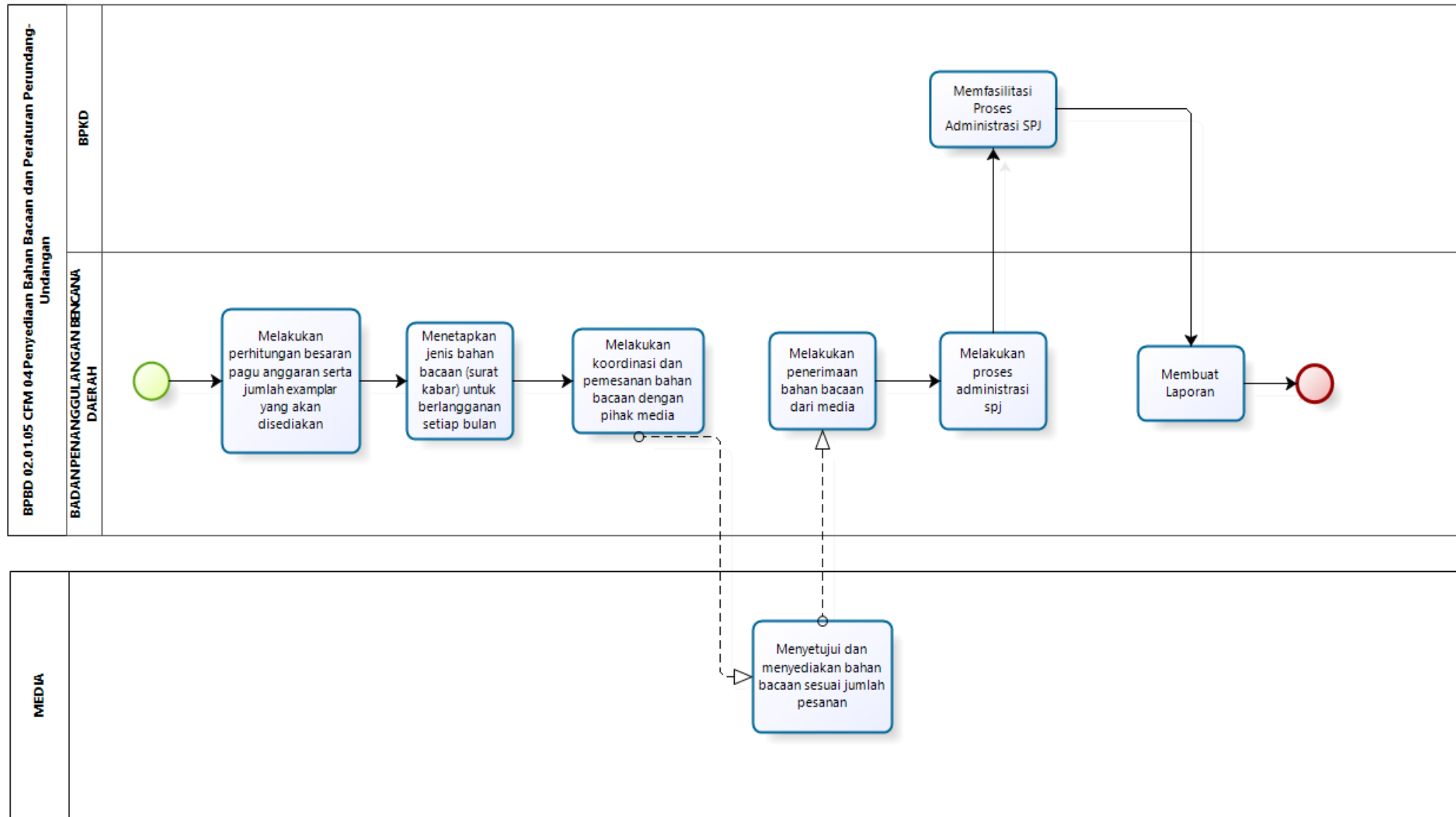


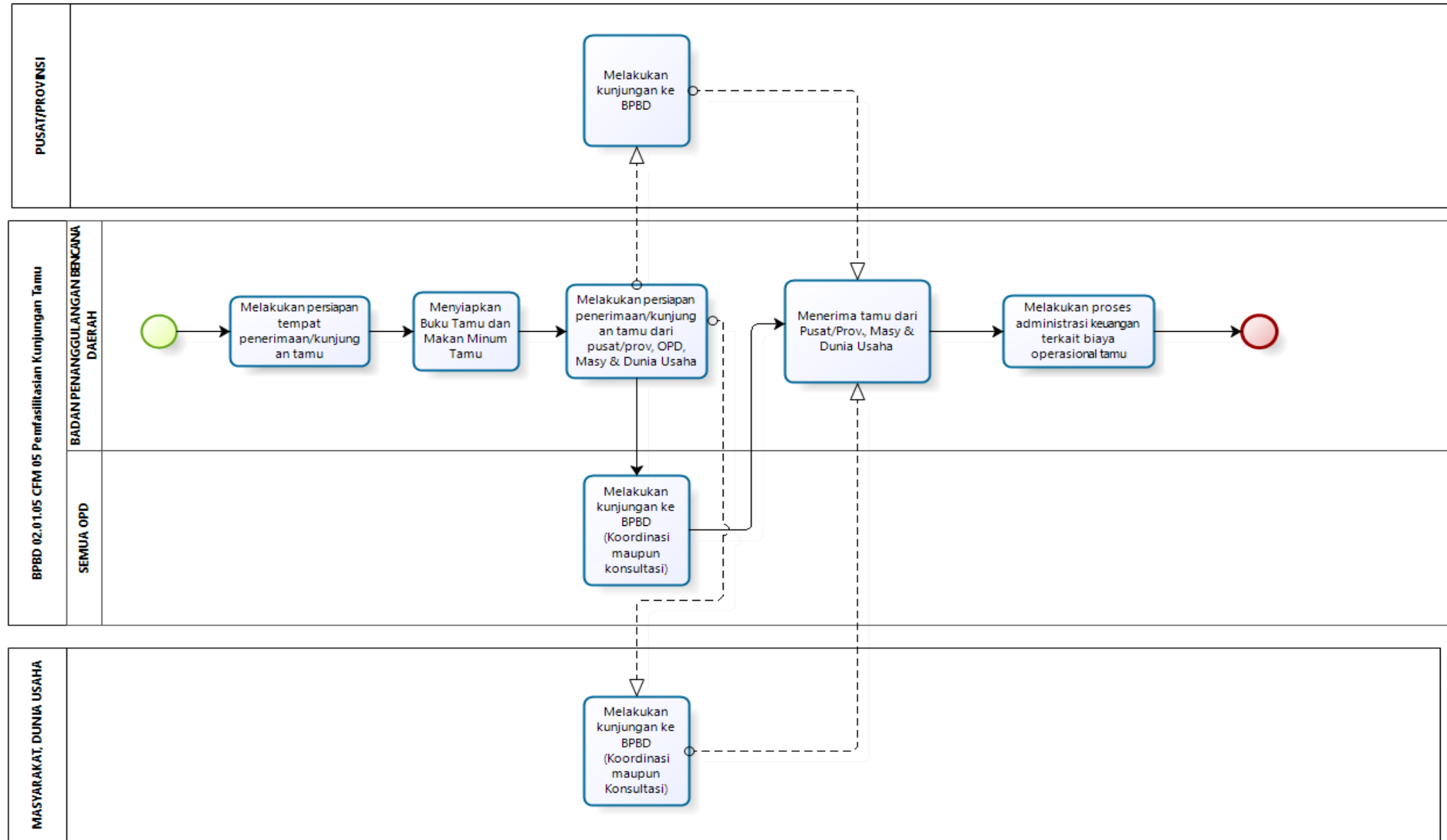


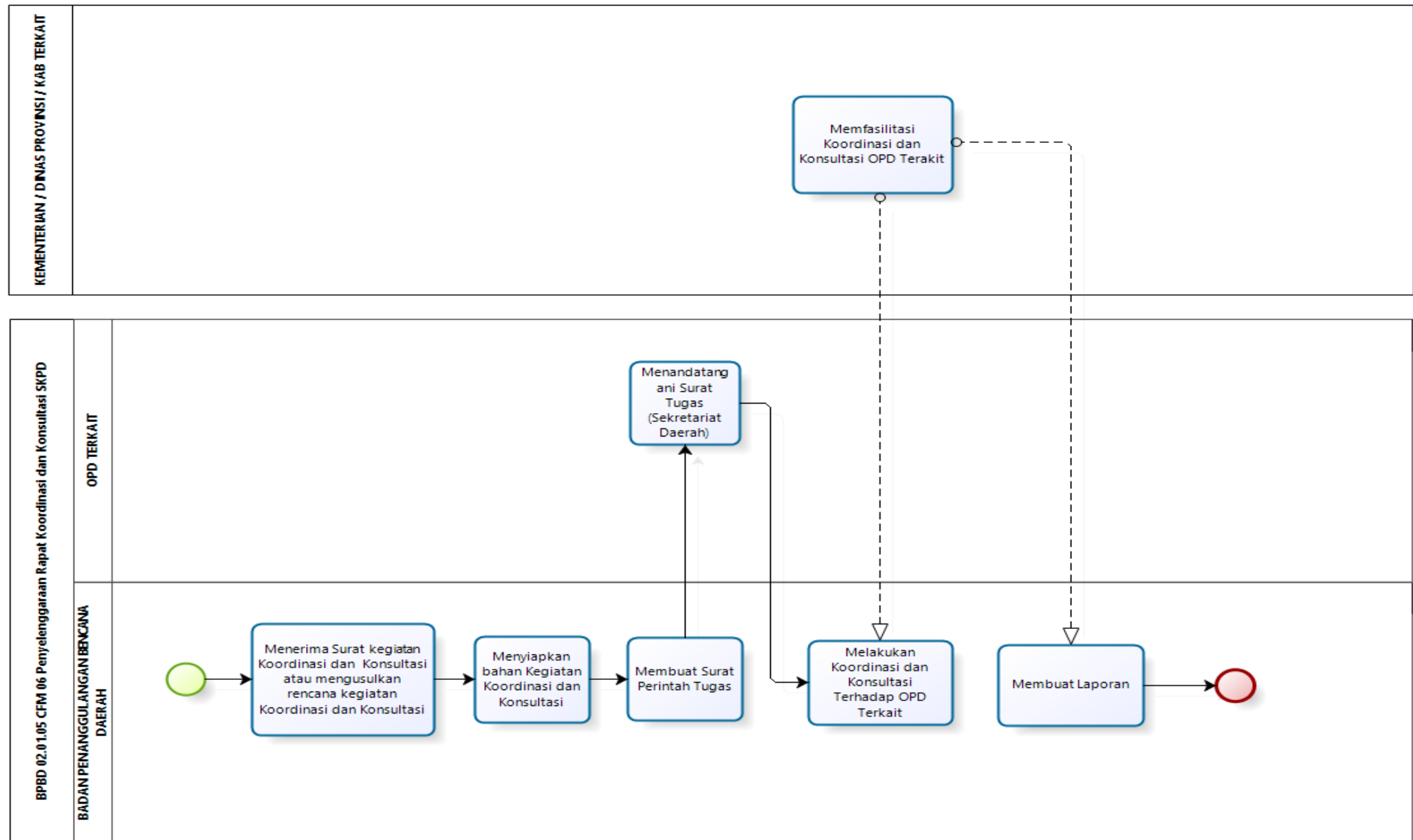


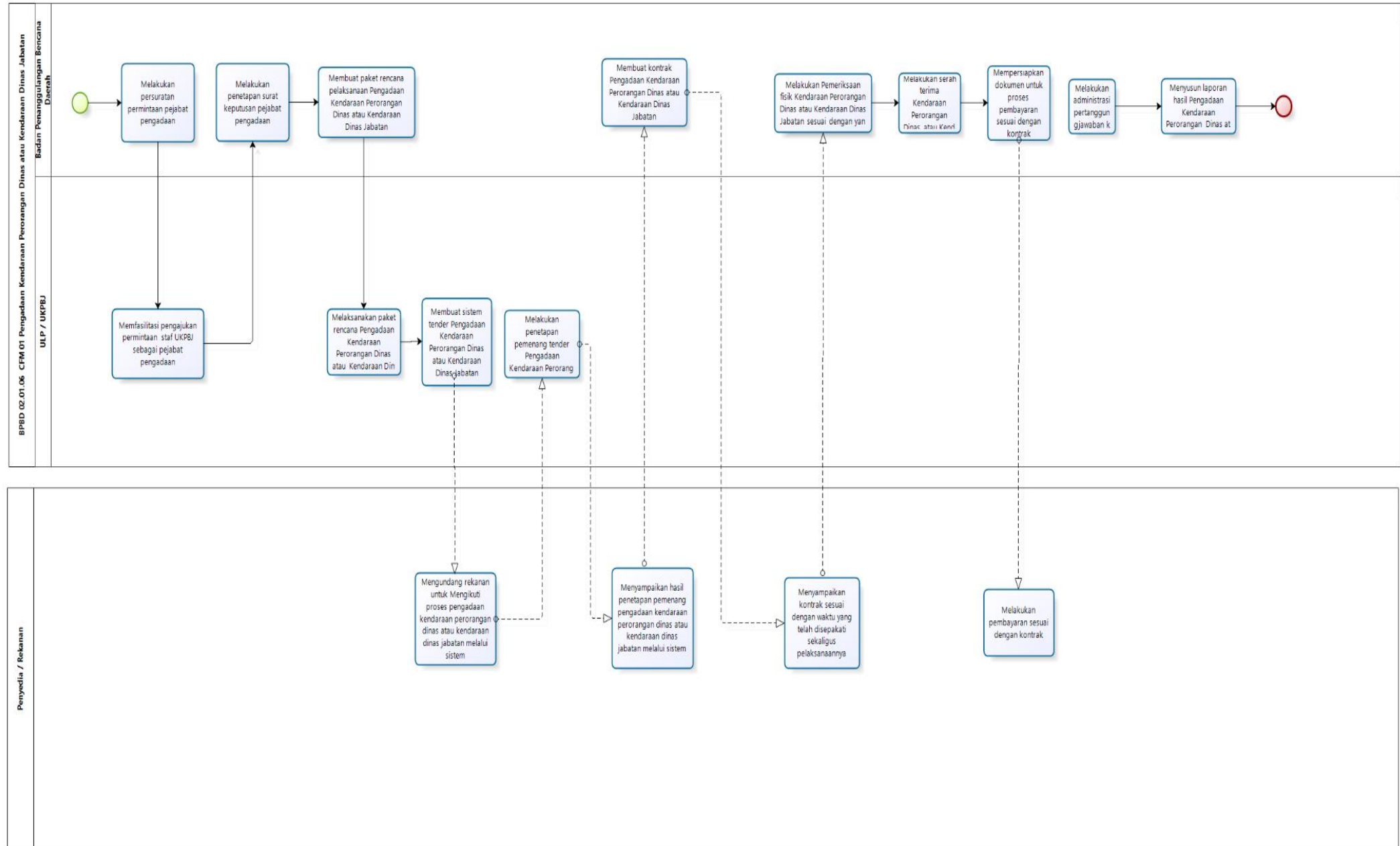


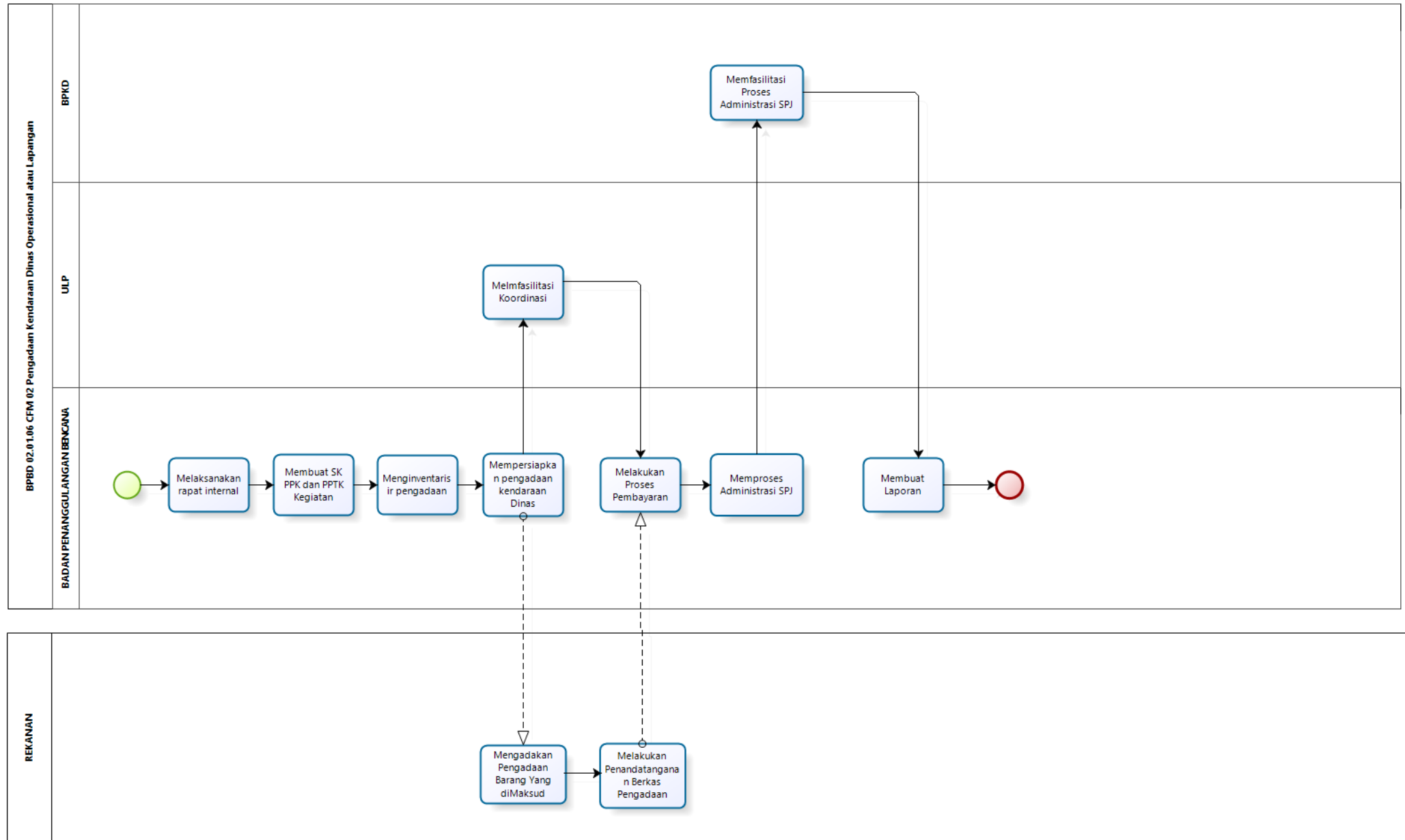


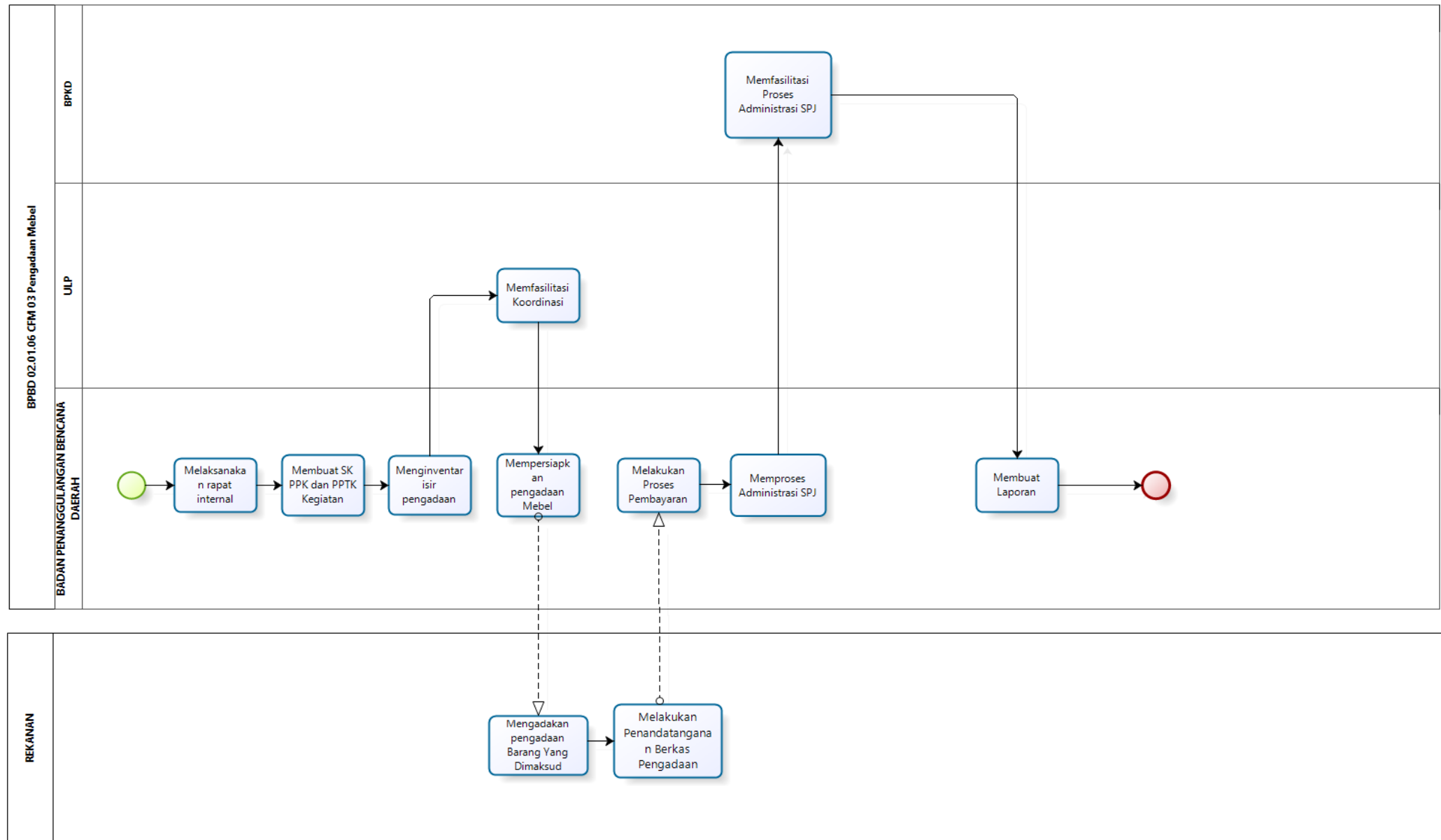


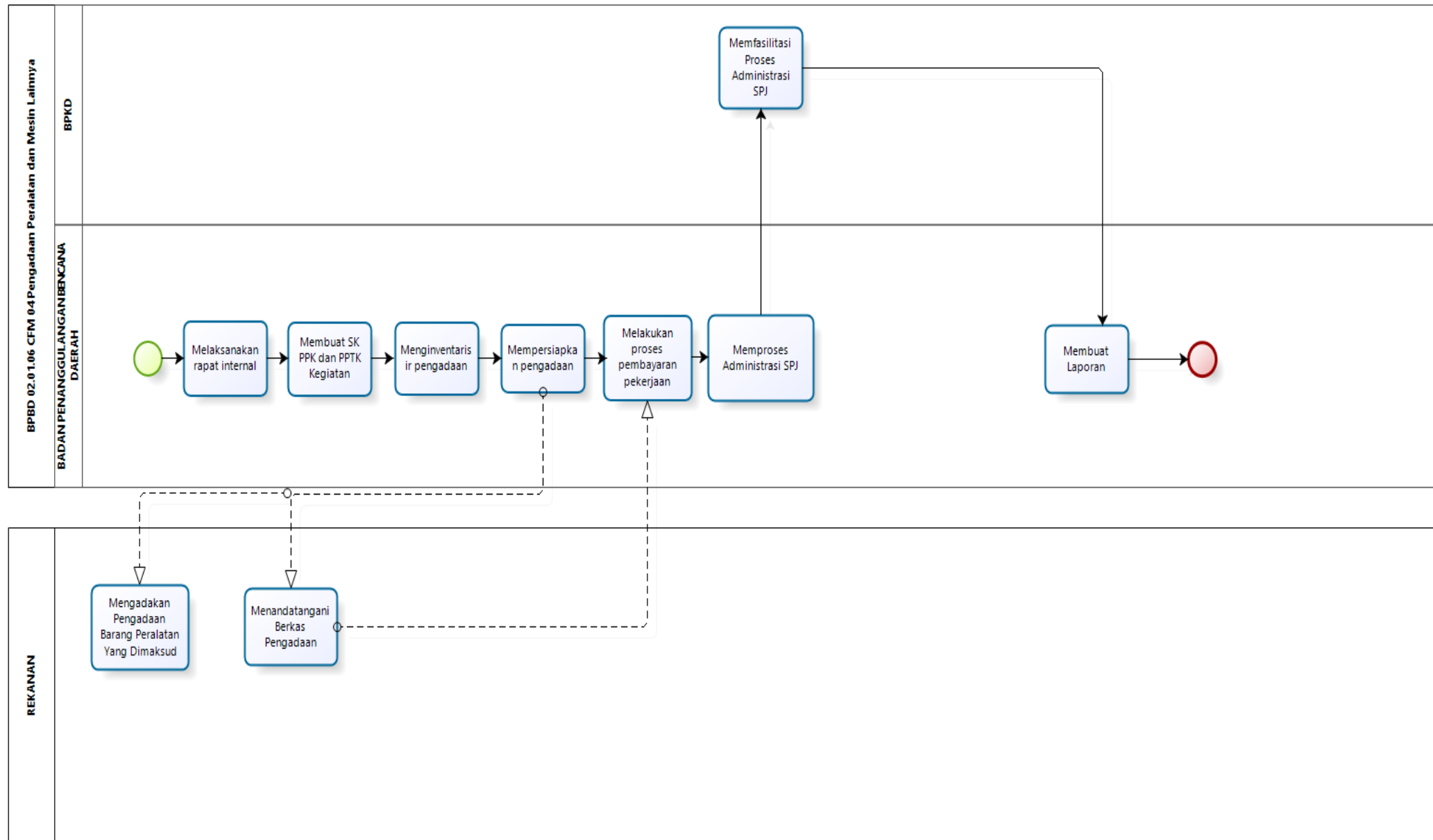


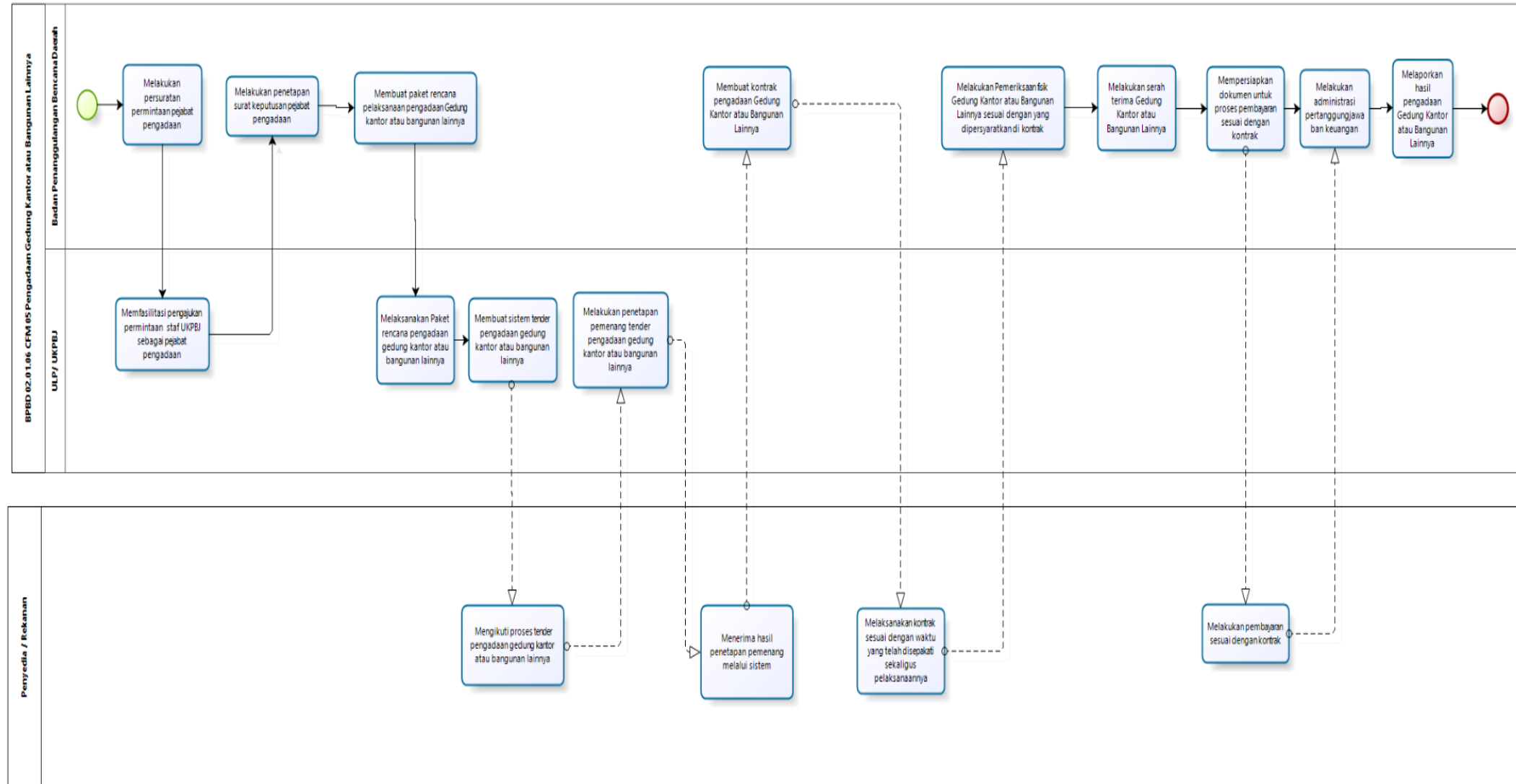


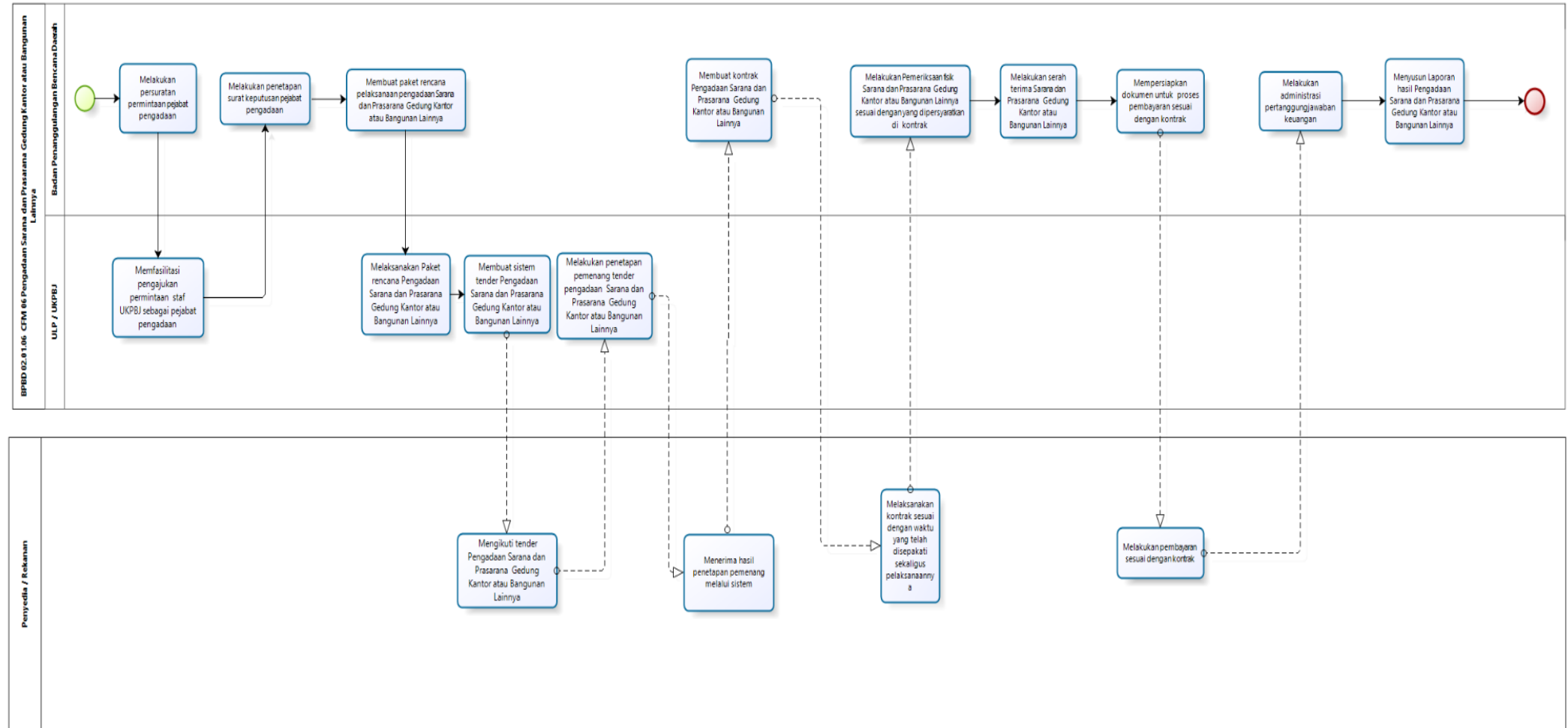


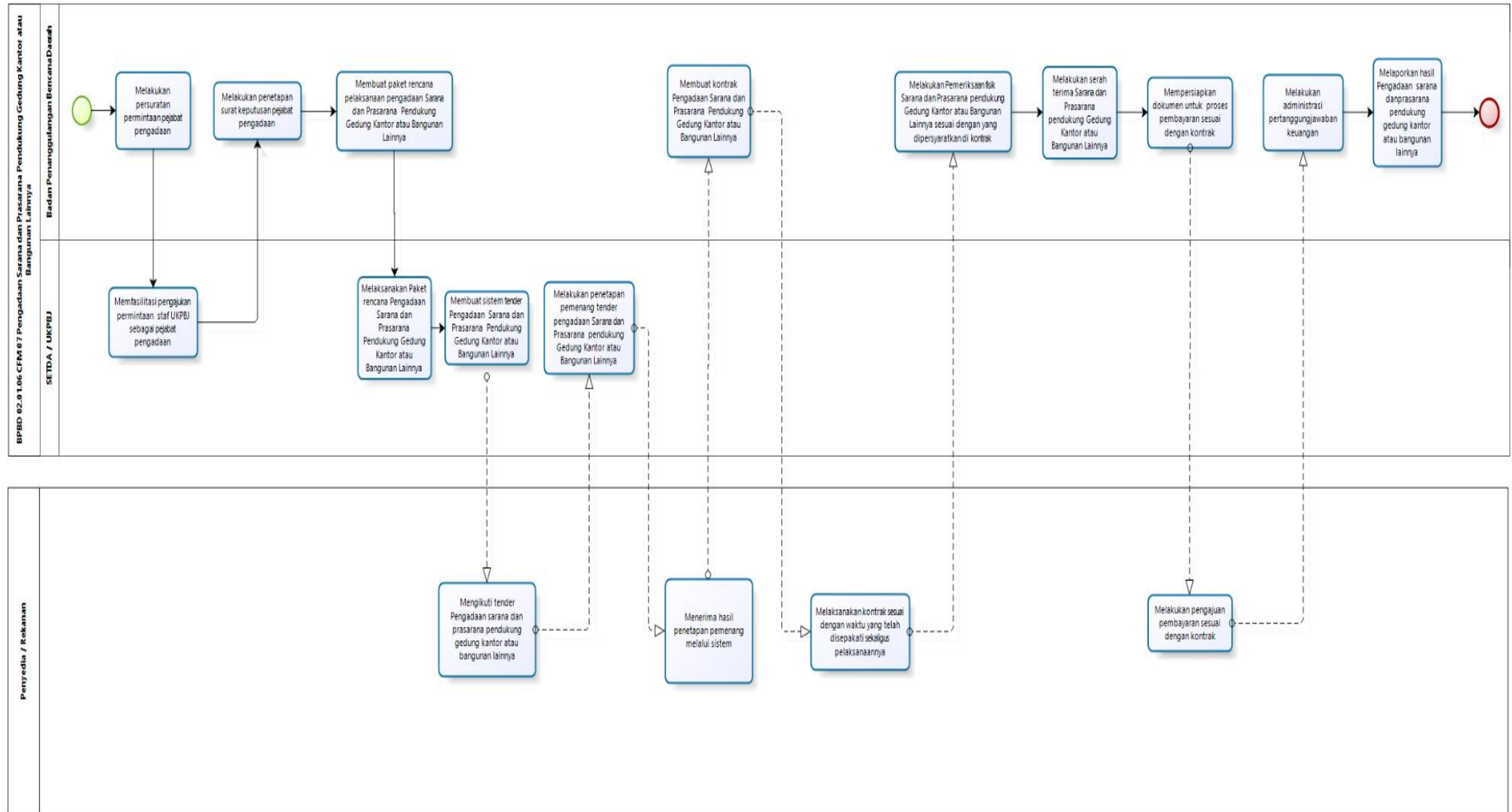


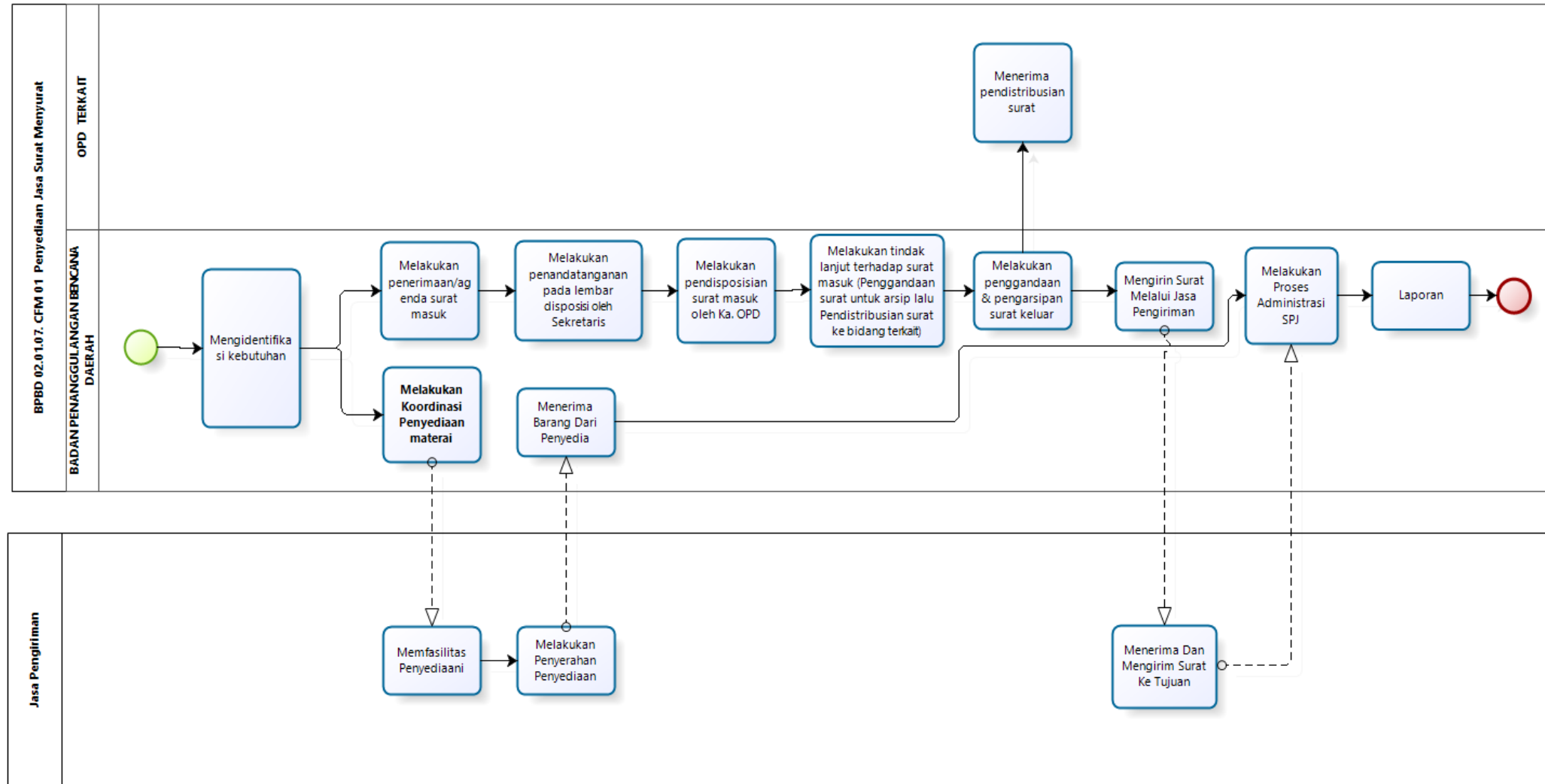


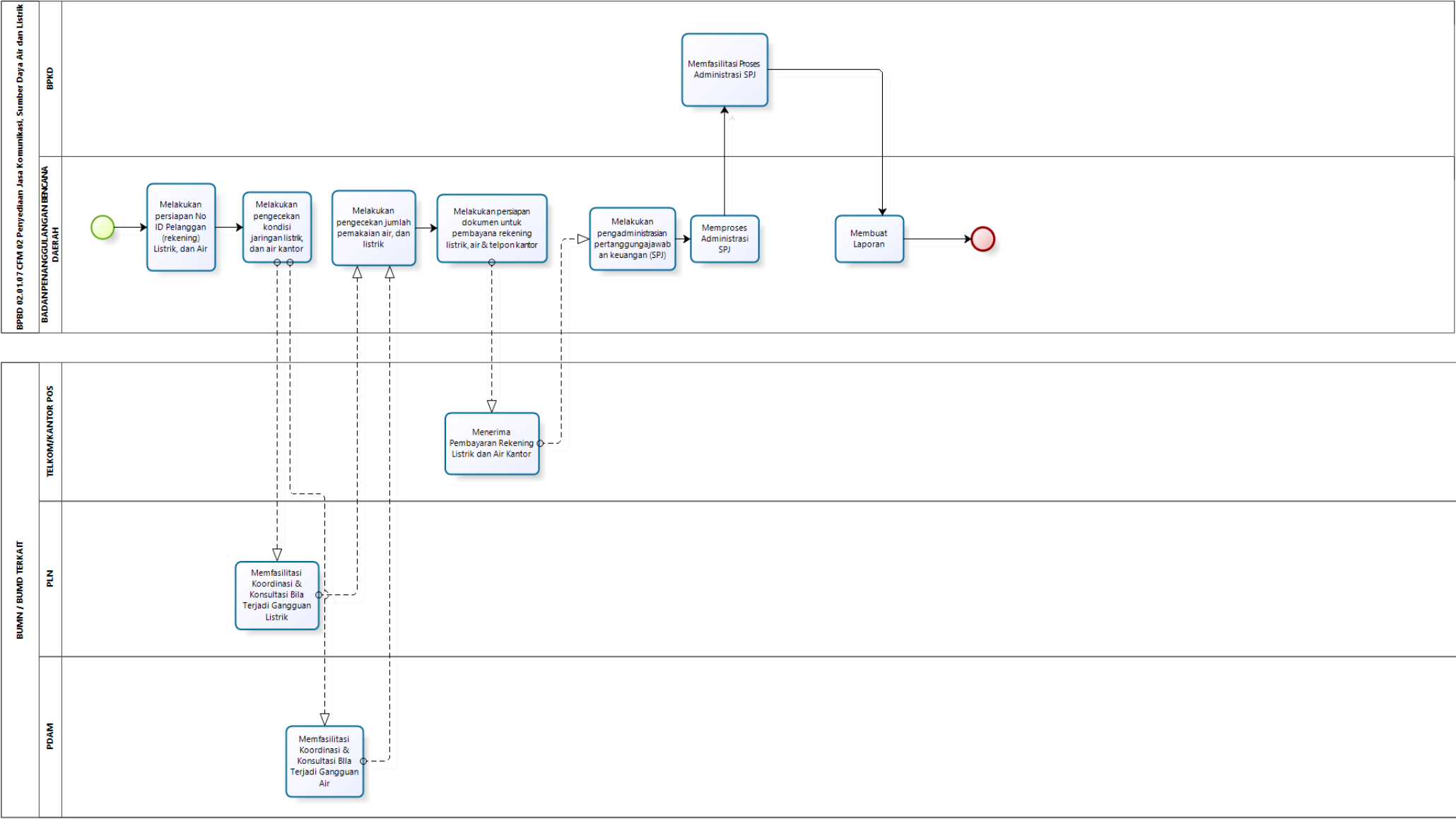


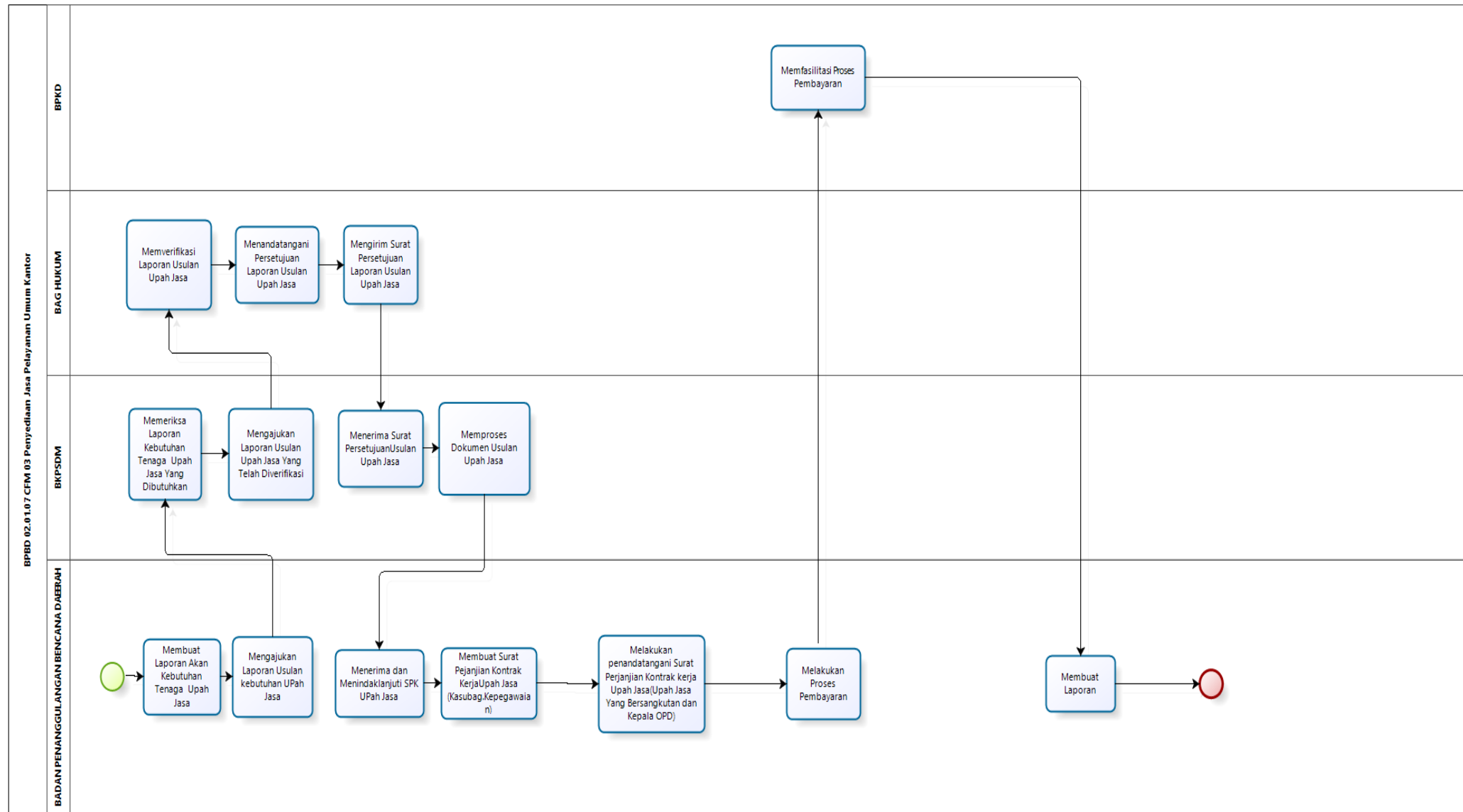


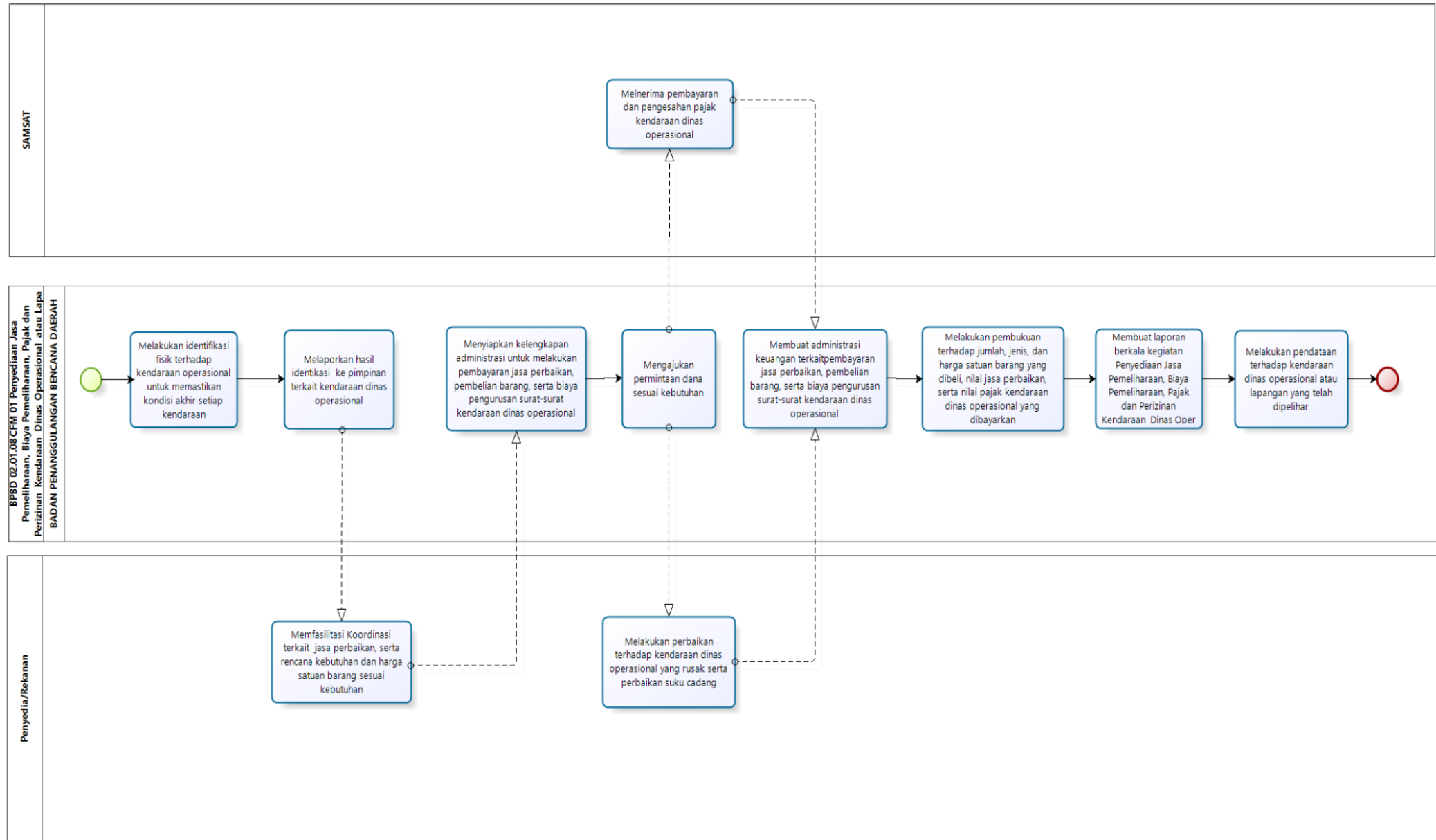


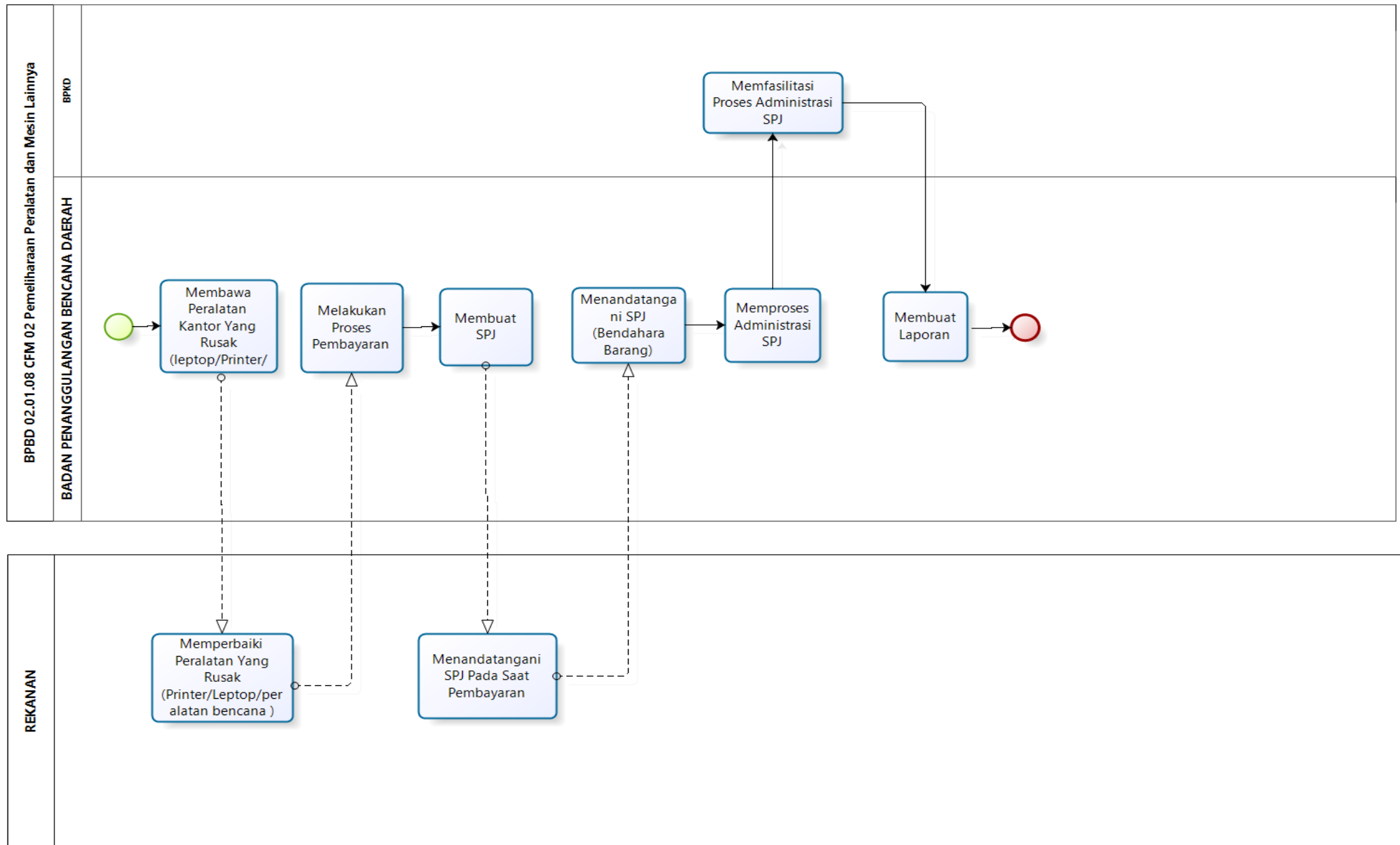


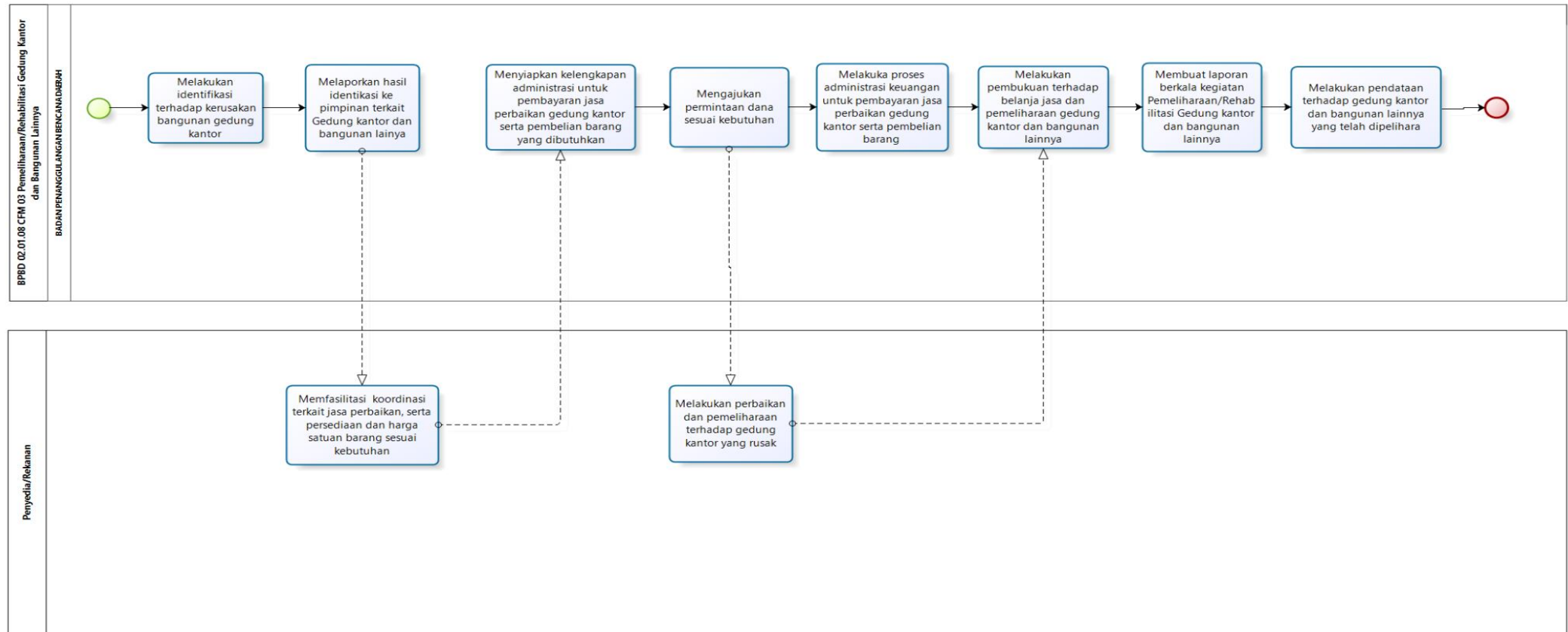












Malili, 30 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA,



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004